

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KELURAHAN JAHAB
KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



OLEH :
MAYDI REICHIES MANURUN
NPM : 2063201080

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KELURAHAN JAHAB
KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



OLEH :

MAYDI REICHIES MANURUN
NPM : 2063201080

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai
(BNPT) Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan
Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nama Mahasiswa : Maydi Reichies Manurun
NPM : 2063201080
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 25 Februari 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. M. Z. Arifin, M.Si
NIDN. 0006065712


Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si
NIDN. 1121038503

Mengetahui
Dekan

Drs. Abdul Rofik, S.P., M.P.
NIDN. 2023.070.326

Penguji

Drs. H. M. Z. Arifin, M.Si

Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si

Ahmad Yani, S. Sos., M. Si

1
2
3

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)
Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Jahab
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama : Maydi Reichies Manurun

Judul Skripsi : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)
Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Jahab
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 25 Februari 2025




Maydi Reichies Manurun
NPM. 2063201080

RIWAYAT HIDUP



Maydi Reichies Manurun, lahir di Tenggarong, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 Mei 2000. Sebagai anak ke empat dari enam bersaudara dari Ayah yang bernama Habel Manurun dan Ibu Ida Dewi.

Riwayat pendidikan dimulai ketika memasuki pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 024 Tenggarong dan lulus di tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Tenggarong dan lulus pada tahun 2015 di tahun yang sama peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Yayasan Pendidikan Kutai Kartanegara dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2020 peneliti meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik.

Pada Tahun 2023 Peneliti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun yang sama peneliti melakukan penelitian untuk menyusun tugas akhir di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

RINGKASAN

MAYDI REICHIES MANURUN. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Di bawah bimbingan Bapak Drs. H. M. Z. Arifin, M.Si selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Trisna Waty Riza Eryani S.Sos., M.Si sebagai Dosen Pembimbing II, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BPNT dan mengidentifikasi kesesuaian antara tujuan program dengan hasil yang dicapai, menganalisis faktor-faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan program, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi program di tingkat masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan pelaksanaan program BPNT agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program BPNT di Kelurahan Jahab didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat, lokasi *E-Warong* yang strategis, serta aksesibilitas yang memadai. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme program, kurangnya pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ketidaktepatan sasaran penerima, serta ketidakpastian jadwal pencairan bantuan. Kendala ini mengakibatkan bantuan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan program menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi aparatur, penyebaran informasi yang lebih menyeluruh, pembaruan data penerima secara berkala, serta penetapan jadwal pencairan yang konsisten untuk memastikan bahwa program BPNT dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan sistem dan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program BPNT di wilayah tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, BPNT, Masyarakat Kurang Mampu, Kelurahan Jahab, Kabupaten Kutai Kartanegara.

KATA PENGANTAR

Shalomm...

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas segala penyertaan dan kasih karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan serta gambaran terkait dengan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Harapan dari penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait atas dorongan serta dukungan yang telah diberikan kepada peneliti terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah

memberikan semangat serta arahan kepada peneliti selama proses pembuatan skripsi ini.

3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan banyak arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan administrasi selama penyusunan skripsi ini
4. Bapak Drs. H. M. Z. Arifin, M.Si selaku pembimbing I, dan Ibu Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, saran, pembelajaran dan bimbingan kepada peneliti.
5. Bapak Ahmad Yani, S. Sos., M. Si selaku Dosen Penguji yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan memberikan arahan serta saran yang baik untuk skripsi yang peneliti susun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Laoren Sirenden S. Sos selaku Lurah beserta staff yang telah menerima peneliti dengan senang hati untuk melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Ayahanda dan Ibunda yang tiada hentinya memberikan motivasi, semangat berjuang kepada peneliti dan tiada hentinya juga mendoakan peneliti dari awal perkuliahan hingga pengerjaan skripsi ini. Tidak lupa juga kepada saudara-saudari terkasih peneliti yang juga selalu mendukung dan mendoakan peneliti dan keluarga besar yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

9. Sahabat-sahabat dan teman-teman peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi.

Walaupun demikian dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan penulisan ini.

Shalomm...

Samarinda, 25 Februari 2025



Maydi Reichies Manurun
NPM. 2063201080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
RINGKASAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori dan Konsep.....	10
2.2 Kebijakan Publik	10
2.2.1 Tujuan Kebijakan Publik.....	14
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan	15
2.2.3 Proses Kebijakan Publik.....	24
2.3 Implementasi.....	25
2.4 Program.....	27
2.5 Bantuan Pangan Non Tunai	29
2.5.1 Mekanisme Penyaluran	31
2.7 Indikator Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	34
2.8 Masyarakat Kurang Mampu	36
2.9 Kerangka Pikir	36

BAB III	METODE PENELITIAN.....	36
3.1	Jadwal Penelitian	40
3.2	Jenis Penelitian	41
3.3	Lokasi Penelitian	42
3.4	Definisi Konsepsional.....	43
3.5	Fokus Penelitian.....	45
3.6	Sumber Data	46
3.6.1	Sumber Data Primer	47
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.8	Analisis Data.....	52
3.8.1	Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>).....	53
3.8.2	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	54
3.8.3	Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	54
3.8.4	Penarikan Kesimpulan.....	55
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.2	Letak Geografis	56
4.2.1	Luas Wilayah.....	58
4.2.2	Batas Wilayah.....	58
4.2.3	Jumlah Penduduk	58
4.2.4	Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan	59
4.2.5	Karakteristik Penduduk Berdasarkan Kepercayaan	61
4.2.6	Berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian.....	62
4.2.7	Infrastruktur dan Fasilitas Umum	64
4.3	Tugas Pokok dan Fungsi.....	70
4.3.1	Tugas Dan Fungsi Kelurahan	70
4.3.2	Tugas Dan Fungsi Sekretaris Kelurahan	71
4.4	Visi Dan Misi Kelurahan Jahab	71
4.4.1	Visi	71
4.4.2	Misi.....	72
4.5	Sumber Daya Manusia di Kantor Kelurahan Jahab.....	73

	4.5.1 Pegawai Kelurahan.....	74
	4.6 Penyajian Data Hasil Penelitian.....	75
	4.7 Pembahasan	98
	4.8 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	105
	4.8.1 Faktor Pendukung	105
	4.8.2 Faktor Penghambat.....	106
BAB V	PENUTUP	108
	5.1 Kesimpulan	108
	5.2 Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2. Surat Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Jahab	59
Tabel 4.2 Penduduk Kelurahan Jahab Menurut Pendidikan.....	60
Tabel 4.3 Penduduk Kelurahan Jahab Menurut Agama	61
Tabel 4.4 Penduduk Kelurahan Jahab Menurut Mata Pencarian.....	63
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana	65
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Ibadah	66
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Kesehatan	67
Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Olahraga	68
Tabel 4.9 Sarana Pendidikan	69
Tabel 4.10 Pegawai Kelurahan Jahab	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	39
Gambar 3.1	Analisis Data Model Interaktif	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2. Surat Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 3 Surat Penerimaan Ijin Penelitian

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan utama negara ini adalah mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek materi, seperti ekonomi yang kuat dan merata, tetapi juga meliputi kualitas hidup yang baik, termasuk akses terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan yang prima, serta lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan kata lain, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warganya hidup dengan layak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa kemiskinan. Banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan akibat rendahnya pendapatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, peran aktif pemerintah sangatlah krusial dalam merancang dan melaksanakan program-program yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data survei BPS Kaltim tahun 2022 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 62,36%. Tingginya persentase ini mengindikasikan urgensi untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Langkah ini penting untuk menemukan solusi alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan luas total sekitar 31.360,10 km² yang terdiri dari daratan 27.263,10 km² dan perairan 4.097 km², Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Timur. Wilayah ini secara administratif dibagi menjadi 18 kecamatan, dengan Kecamatan Tenggarong sebagai pusat pemerintahannya yang terdiri dari 14 kelurahan.

Kelurahan Jahab, yang terletak di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, menjadi lokasi penelitian ini. Dengan luas wilayah mencapai 42,67 km², Kelurahan Jahab dihuni oleh 4.627 penduduk. Meskipun terdapat 162 jiwa yang tergolong masyarakat kurang mampu, hanya 35 jiwa di antaranya yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Disparitas antara jumlah penduduk kurang mampu dan penerima bantuan ini menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi ini ditandai oleh berbagai indikator, seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar. Perubahan sosial seperti bencana alam atau pemutusan hubungan kerja dapat memperburuk kondisi kemiskinan, terutama di tengah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

Salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri.

Program pemerintah yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) melalui mekanisme uang elektronik. KPM dapat menggunakan uang elektronik ini untuk membeli bahan pangan di toko yang telah ditunjuk dan bekerja sama dengan bank penyalur.

Keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp.600.000 dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap tiga bulan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang elektronik, yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di toko yang telah ditunjuk.

Tujuan utama program BPNT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan KPM dengan mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan dan memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Pelaksanaan program BPNT mengacu pada berbagai peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Meskipun bertujuan baik, pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalah utama adalah ketidaktepatan sasaran, di mana bantuan sering kali diterima oleh orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif dalam proses penyaluran juga menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Akibatnya, tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui program ini belum tercapai secara maksimal.

Selain itu yang menjadi persoalan dalam penerimaan bantuan tersebut adalah pencairannya yang tidak tepat waktu, sedangkan didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2021 pencairan dilakukan dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti menemukan masih ada beberapa masalah antara lain :

- a. Penyaluran belum tepat sasaran
- b. Pencairan dana tidak tepat waktu

Dengan demikian, hal ini yang masih menjadi permasalahan di kelurahan Jahab terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah tersebut, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara”

1.2 Rumusan Masalah

Sebelum menentukan masalah penelitian, peneliti akan mengemukakan pendapat para ahli untuk membantu memahami dan mendefinisikan masalah.

Menurut Moleong (2014:93) “Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan”. Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018:40), "Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai masalah. Namun, masalah penelitian dipilih secara khusus untuk dipelajari secara menyeluruh. Karena masalah penelitian memiliki batasan yang jelas, kita dapat membangun pertanyaan penelitian yang spesifik dan mencari jawabannya melalui penelitian”.

Menurut Fraenkel & Wallen (dalam Sugiyono 2015:84) "Masalah penelitian merupakan sesuatu yang pasti, dimana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti, kondisi yang akan ditingkatkan, kesulitan yang dieliminasi, dan merupakan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian dalam konteks pengumpulan data dan wawancara lapangan. Dengan demikian, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat kurang mampu di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi program bantuan pangan non tunai di kelurahan jahab kecamatan tenggarong kabupaten kutai kartanegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian diciptakan untuk memenuhi rasa keingintahuan manusia terhadap suatu permasalahan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang berkaitan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti serta tujuan dari penelitian selalu berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi.

Menurut Yanuar Ikbar (2014:131) “Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sesuatu, ingin mengungkap sesuatu, atau ingin mencari pemecahan masalah tertentu dan ingin segala sesuatu yang hendak di inginkan”.

Menurut Sugiyono (2017:290), “Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan”. Namun, Ulber Sillahi (2017:612) menyatakan bahwa “Tujuan penelitian adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran diadakannya suatu penelitian”. Selain itu, Menurut Ali Sodiq (2015:7) “Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan yang memberikan arah bagi suatu peneliti”.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa definisi dari tujuan penelitian adalah sekumpulan pernyataan yang akan menjelaskan sasaran-sasaran guna membantu peneliti menemukan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam suatu penelitian. Dari pernyataan diatas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian yaitu, untuk mengevaluasi pelaksanaan program BPNT dan mengidentifikasi kesesuaian antara tujuan program dengan hasil yang dicapai, menganalisis faktor-faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan program, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi program di tingkat masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi program dan pengembangan, serta untuk wawasan ilmu pengetahuan. Maka daripada itu sangat penting bagi peneliti untuk menguraikan manfaat dan kegunaan hasil penelitian secara rinci untuk dipahami oleh pembaca.

Menurut Sugiyono (2018:3) "Data yang diperoleh dari penelitian memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang belum diketahui, mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, serta merancang langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa mendatang." Sedangkan menurut Rachmat Trijono (2015:15) "Tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena atau masalah. Melalui penelitian, kita dapat mengumpulkan

data, menganalisis informasi, dan mengembangkan pengetahuan baru. Pengetahuan ini dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, atau teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, sosial, atau lainnya”.

Uber Silalahi (2017:614) menyatakan bahwa "penelitian memiliki banyak manfaat. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan baru, memperbaiki praktik yang ada, dan menemukan solusi untuk berbagai masalah. Penelitian memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis”.

1. Secara teoritis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Diharapkan temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan karena dapat digunakan sebagai contoh dan referensi untuk penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan beberapa masukan kepada pemerintah Kelurahan untuk membantu mereka membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat kurang mampu di Kelurahan.
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di

Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Konsep

Dalam melakukan penelitian ilmiah seorang peneliti harus memiliki dasar-dasar penulisan yang berupa teori-teori, karena teori merupakan dasar pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

Menurut Neumen (dalam Sugiyono. 2017:52) "Teori merupakan kerangka kerja yang terdiri dari konsep-konsep dan hubungan antar konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Dengan teori, kita dapat memahami pola-pola yang terjadi dalam suatu peristiwa dan membuat prediksi tentang kejadian di masa depan."

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:54) "Teori dapat diibaratkan sebagai kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dan proposisi yang saling berhubungan. Teori tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi, tetapi juga memungkinkan kita untuk memprediksi kejadian di masa depan dan bahkan mengendalikannya."

Sedangkan, menurut Kerlinger (dalam Sugiyono. 2021:78) mengemukakan bahwa "Teori adalah kerangka berpikir yang terdiri dari konsep-konsep dan hubungan antar konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena secara sistematis. Dengan teori, kita dapat memahami pola-pola yang terjadi dalam suatu peristiwa dan membuat prediksi tentang kejadian di masa depan."

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, teori dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang menggabungkan sejumlah konsep dan definisi secara sistematis untuk memberikan penjelasan tentang fenomena dunia nyata.

Menurut Muslich Anshori dan Sri Iswati (2017:69) "Konsep adalah gambaran umum yang kita bentuk dari banyak hal yang memiliki kesamaan. Konsep ini bersifat abstrak, artinya tidak terikat pada contoh-contoh konkret tertentu."

Sedangkan menurut Warul Walidin (2015:12) menyatakan bahwa "Konsep merupakan hasil dari proses berpikir manusia yang melibatkan pengabstraksian dari fakta-fakta konkret. Konsep bersifat abstrak dan unik bagi setiap individu. Untuk dapat berkomunikasi dan berbagi pengetahuan, konsep perlu diungkapkan secara jelas dan sistematis dalam bentuk tulisan atau bahasa lainnya."

Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:81) "Konsep adalah istilah yang bersifat abstrak dan bermakna generalisasi".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah sebuah ide yang menjelaskan secara abstrak suatu peristiwa atau fenomena.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah serangkaian prinsip dan aturan yang digunakan untuk merencanakan dan menerapkan tindakan. Kebijakan tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga dapat diterapkan dalam organisasi, bisnis, dan

kehidupan sehari-hari. Kebijakan berbeda dengan hukum yang lebih bersifat formal dan mengikat.

Menurut Fredrich (dalam Agustino 2017:166), Kebijakan adalah kumpulan tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dibuat sebagai respons terhadap tantangan atau peluang yang ada dalam suatu lingkungan, baik itu lingkungan sosial, ekonomi, atau politik.

Menurut Crinson (dalam Ayuningtyas 2014:8) kebijakan bukanlah sesuatu yang konkret dan dapat diukur secara langsung. Kebijakan lebih merupakan konsep atau ide yang menjadi dasar bagi tindakan-tindakan yang lebih spesifik. Karena sifatnya yang abstrak, maka memberikan definisi yang tunggal dan pasti untuk kebijakan menjadi sangat sulit.

Selanjutnya menurut Richard Rose (dalam Winarno 2014:17) Kebijakan bukan sekadar keputusan tunggal, melainkan serangkaian tindakan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi berbagai pihak yang terlibat. Kebijakan harus dipandang sebagai suatu proses yang kompleks, bukan hanya hasil akhir dari sebuah keputusan.

Kebijakan dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang kompleks, di mana berbagai komponen saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Sistem kebijakan ini diatur oleh aturan-aturan tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Publik terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi mereka berbagi minat atau perhatian pada satu masalah atau topik.

Menurut Krisyantono (dalam Muhammad Sawir 2020:107) menyatakan bahwa publik sebagai kelompok orang atau kelompok masyarakat yang memiliki minat yang sama pada suatu masalah.

Sedangkan, Menurut Hasniati et al. (2020:96) menyatakan bahwa "publik berkenaan dengan masyarakat yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan sikap yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki."

Selanjutnya, Frank Jefkins (dalam Ahmad Mustanir 2022:17) mendefinisikan publik sebagai kelompok atau individu yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal.

Serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani kebutuhan dan masalah masyarakat dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan, atau memajukan perekonomian. Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan publik, efektivitas, dan keberlanjutan.

Penggunaan istilah kebijakan publik sangatlah luas. Istilah ini tidak hanya merujuk pada konsep umum tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga

dapat digunakan untuk merujuk pada kebijakan-kebijakan khusus yang berkaitan dengan bidang tertentu, seperti birokrasi atau regulasi

Menurut Dye (dalam Leo Agustino, 2016:7) menggambarkan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah tentang tindakan yang tepat.

Sementara itu, Anderson (dalam Agustino 2017:17) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan, Frederich (dalam Leo Agustino, 2016:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang dilakukan dengan hati-hati untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan ini dibuat sebagai respons terhadap tantangan atau peluang yang ada dalam suatu lingkungan, baik itu lingkungan sosial, ekonomi, atau politik. Kebijakan publik melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti nilai-nilai, kepentingan, dan sumber daya yang tersedia.

2.2.1 Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat melalui berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Menurut James E. Anderson (2019:15) “Kebijakan publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi,

memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta mencapai kesejahteraan umum. Kebijakan publik dirancang untuk memberikan solusi efektif dan efisien untuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat”.

Selanjutnya menurut Thomas R. Dye (2020:25) “Tujuan kebijakan publik adalah menyelesaikan masalah Masyarakat melalui keputusan pemerintah, serta mencapai tujuan seperti keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan publik. Kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai hasil-hasil tersebut”.

Sedangkan menurut Michael Howlett dan M. Ramesh (2023:10) menjelaskan bahwa “Tujuan kebijakan publik meliputi penyelesaian masalah sosial dan ekonomi, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kinerja pemerintah. Mereka juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan keberlanjutan dalam perancangan kebijakan”.

Di atas semua itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kebijakan publik bertujuan untuk menemukan dan menangani masalah besar seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan sumber daya.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Ada berbagai model untuk menerapkan kebijakan publik. Pemilihan model implementasi yang tepat akan sangat memengaruhi

keberhasilan kebijakan. Semua yang terlibat, termasuk pemerintah dan masyarakat, akan terkena dampak ini.

Menurut Matland (dalam Hamdi, 2014:98) menyatakan bahwa studi implementasi kebijakan telah menghasilkan berbagai perspektif. Secara umum, perspektif ini termasuk dalam tiga kelompok utama: *top-down*, *bottom-up*, dan kombinasi keduanya. Pendekatan *top-down* menekankan peran pemerintah pusat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, sedangkan pendekatan *bottom-up* menekankan peran masyarakat dan kelompok sasaran dalam proses implementasi. Pendekatan ketiga mencoba untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti konflik dan ketidakpastian yang sering terjadi dalam proses implementasi.

1. Konflik-ambiguitas yang rendah (implementasi administratif)
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (penerapan undang-undang)
3. Konflik ambiguitas tinggi-tinggi (implementasi simbolik)
4. Konflik dengan amplitudo rendah (implemetasi eksperimental)

Menurut Matland (dalam Hamdi,2014:98), empat ide utama model *top-down* adalah:

1. Tujuan kebijakan harus jelas dan konsisten.
2. Mengurangi jumlah aktor.
3. Membatasi luasnya perubahan yang dibutuhkan.

4. Memberikan tanggung jawab implementasi kepada lembaga yang memahami tujuan kebijakan.

Sedangkan menurut Tahir (2014:61-62), “Keberhasilan implementasi kebijakan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks. Teori-teori implementasi kebijakan berusaha menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan’.

Dua pertanyaan utama biasanya menjadi pusat model George C. Edwards III dalam Studi Implementasi Kebijakan (dalam Tahir, 2014:61-62). Apa saja elemen yang mendukung keberhasilan suatu kebijakan dan apa saja hambatan yang dapat mencegah pencapaian tujuan kebijakan.

Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat komponen implementasi kebijakan publik: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Dia menjelaskan empat komponen tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur.

Model Donald Van Horn (dalam Tahir, 2014:71-72), banyak variabel yang saling berhubungan mempengaruhi kinerja kebijakan. Faktor-faktor ini termasuk kualitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, kejelasan tujuan kebijakan, karakteristik pelaksana, dan keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149), empat faktor menentukan pelaksanaan kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi (komunikasi)

George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:150), komunikasi adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik informasi disampaikan. Semua pihak yang terlibat, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan, harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Agar tidak ada kesalahpahaman, informasi harus akurat, mudah dipahami, dan konsisten. Ada tiga cara untuk mengukur keberhasilan komunikasi di atas, yaitu:

a. Transmisi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi. Jika informasi tidak disampaikan dengan jelas dan akurat, maka akan terjadi miskomunikasi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Semakin banyak tingkatan birokrasi yang dilalui, semakin besar kemungkinan terjadinya distorsi informasi.

b. Kejelasan,

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif, pesan yang disampaikan kepada para pelaksana harus jelas dan tidak ambigu. Fleksibilitas dalam pelaksanaan memang diperlukan, namun terlalu banyak ruang untuk interpretasi dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan awal kebijakan.

c. Konsistensi

Perintah atau aturan harus konsisten agar kebijakan berfungsi dengan baik. Perubahan yang sering pada aturan dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat pelaksanaan kebijakan

2. Sumber daya

Ahli kebijakan publik George C. Edward III menyatakan (dalam Agustino, 2006:151) bahwa sumber daya sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini meliputi berbagai hal, seperti uang, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Staf

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan bergantung pada staf. Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, diperlukan pekerja yang mencukupi dan berkualitas. Tidak adanya karyawan atau kurangnya keterampilan dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

b. Informasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi memainkan peran yang sangat krusial. Pelaksana kebijakan membutuhkan informasi yang jelas tentang tanggung jawab dan tugas mereka selain kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Informasi yang lengkap dan akurat akan membantu memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan efektif.

c. Wewenang

Dalam pelaksanaan kebijakan, wewenang sangat penting. Wewenang memberikan legitimasi bagi para pelaksana untuk mengambil tindakan dan memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. Jika tidak ada wewenang yang jelas, pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan sulit mencapai tujuannya.

d. Fasilitas

Suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh ketersediaan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan fasilitas yang baik, pelaksanaan kebijakan akan terhambat meskipun sudah memiliki staf yang kompeten.

3. Disposisi

George C. Edward III berpendapat (dalam Agustino, 2006:152) bahwa selain sumber daya, sikap atau kesediaan

orang-orang yang terlibat dalam menjalankan kebijakan, baik itu pejabat pemerintah maupun masyarakat, juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan.

Selain pengetahuan dan keterampilan, sikap dan motivasi para pelaksana kebijakan juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Pelaksana kebijakan harus benar-benar berkomitmen untuk melakukan tugasnya dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Berikut ini adalah faktor-faktor disposisi yang perlu diperhatikan:

a. Pengangkatan birokrat

Sikap dan motivasi para pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Jika para pelaksana tidak memiliki komitmen terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, maka akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk memilih dan mengangkat pegawai yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan dan kepentingan masyarakat.

b. Insentif

Salah satu cara untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik adalah dengan memberikan insentif kepada para pelaksana. Dengan memberikan imbalan atau

hukuman, kita dapat memotivasi mereka untuk bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa manusia cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi.

4. Struktur Birokrasi.

George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153) menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik ditentukan oleh struktur birokrasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada sumber daya dan kemauan para pelaksana, tetapi juga pada struktur birokrasi yang mendukung. Jika struktur birokrasi tidak efektif, koordinasi antar berbagai pihak menjadi sulit, dan hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi dan organisasi adalah:

a. *Standar Operating Prosedure (SOP)*

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian petunjuk atau langkah-langkah yang baku yang harus diikuti oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan secara konsisten dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

b. Melaksanakan fragmentasi,

Fragmentasi adalah proses pembagian tugas dan tanggung jawab suatu kegiatan kepada beberapa unit kerja yang berbeda. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di tempat kerja.

2.2.3 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik bukanlah hasil yang instan, melainkan melalui serangkaian proses yang kompleks dan memakan waktu..

Proses pengembangan kebijakan terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahap berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi tahap berikutnya.

Ayuningtyas (2014:30) menjelaskan proses pengembangan kebijakan publik.

a. Pembuatan Agenda

Pembentukan kebijakan adalah proses yang kompleks yang melibatkan banyak pihak dan dimulai dengan menemukan masalah yang dihadapi masyarakat. Setelah masalah diidentifikasi, berbagai alternatif solusi akan dipertimbangkan dan dipilih. Kebijakan yang telah dipilih kemudian akan diimplementasikan dan dievaluasi untuk melihat efektivitasnya. Jika ditemukan kekurangan, maka siklus kebijakan akan dimulai kembali

b. Formulasi Kebijakan

Pembentukan kebijakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, mulai dari penentuan masalah yang akan ditangani, perumusan solusi, hingga evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Pengadopsian Kebijakan

Adopsi kebijakan merupakan tahap di mana alternatif kebijakan yang telah dirumuskan dipilih dan disahkan secara resmi untuk menjadi kebijakan yang berlaku. Pilihan kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat dan dampak yang mungkin timbul.

d. Pengimplementasian Kebijakan

Untuk mencapai tujuannya, kebijakan harus diterapkan. Implementasi, menurut Mulyadi (2015:12), adalah kumpulan tindakan yang diambil untuk menerapkan keputusan yang telah dibuat. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dan mencapai hasil yang diharapkan.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah upaya untuk mengukur dan menilai efektivitas suatu kebijakan. Evaluasi tidak hanya melihat proses pelaksanaannya, tetapi juga hasil yang dicapai dan dampaknya terhadap masyarakat

2.3 Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan rencana yang telah disusun secara cermat. Proses ini termasuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), "Implementasi adalah proses penerapan suatu kebijakan dalam praktik, yang melibatkan penyediaan sumber daya dan tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan."

Menurut Oktasari (2015:1340) "Implementasi adalah proses penerapan suatu kebijakan atau rencana ke dalam tindakan nyata. Ini melibatkan penyediaan sumber daya dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan."

Menurut Meter dan Horn (dalam Ratri, 2014:4), "Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan". Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis dan kompleks, yang tidak hanya menghasilkan *output* (hasil kegiatan) tetapi juga *outcome* (dampak yang lebih luas)."

Selanjutnya, Grindle (dalam Mulyadi, 2015:47) menyatakan bahwa "Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi".

Implementasi merupakan tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan. Setelah sebuah kebijakan disahkan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi mencakup berbagai tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan.

2.4 Program

Program adalah serangkaian kegiatan yang disusun dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Program biasanya melibatkan berbagai aktivitas yang saling terkait dan harus dilaksanakan secara terpadu.

Menurut Farida Yusuf Tayibnapis (2013:9) "Program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan."

Selanjutnya menurut Paul A. Sabatier (2021:120) menyatakan bahwa "program adalah hasil dari koalisi aktor yang memiliki keyakinan dan kepentingan bersama. Program merupakan produk dari interaksi antara berbagai kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan untuk mencapai tujuan mereka".

Sedangkan menurut Michael Howlett dan M. Ramesh (2023:65) menyatakan bahwa "program adalah bagian dari siklus kebijakan yang melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk mencapai tujuan tertentu, program menggunakan berbagai sumber daya dan alat kebijakan".

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka disimpulkan bahwa Teori program dalam kebijakan publik berfokus pada perencanaan,

implementasi, dan evaluasi tindakan-tindakan konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Program berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam aksi nyata.

2.5 Bantuan Pangan Non Tunai

Kemiskinan merupakan tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal diukur sebagai tingkat kemiskinan mereka. Dengan populasi yang meningkat pesat, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya yang diperlukan untuk hidup layak. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bencana alam, perubahan ekonomi, dan ketidaksetaraan sosial adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program pemerintah yang membantu orang miskin. Program ini memiliki prosedur standar operasional standar (SOP) untuk menjalankan penyaluran BPNT.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk membantu orang miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bantuan sebesar Rp.600.000 yang diberikan setiap tiga bulan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah penurunan kualitas hidup

penerima manfaat. Pemerintah berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal

Bantuan sosial ditujukan bagi individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti keluarga miskin, orang-orang dengan disabilitas, atau mereka yang rentan terhadap masalah sosial.

Bank penyalur berfungsi sebagai perantara antara pemerintah (atau lembaga yang memberikan bantuan) dengan masyarakat penerima bantuan sosial. Bank ini membuka rekening khusus untuk menampung dana bantuan yang kemudian akan disalurkan kepada penerima yang berhak.

E-warong, atau warung gotong royong elektronik, adalah mitra kerja bank yang menyediakan layanan pencairan dan penukaran bantuan sosial. Masyarakat penerima bantuan dapat menggunakan dana mereka untuk membeli barang kebutuhan pokok di *e-warong* ini.

Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako mengatur berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah satu hal yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab pihak *E-warong* dalam mendistribusikan bantuan kepada KPM secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Apabila terdapat indikasi atau terbukti terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas oleh pihak *E-warong*, baik itu berupa penyelewengan dana, praktik tidak transparan, penyalahgunaan wewenang, pemaksaan

pembelian barang di luar ketentuan, pengurangan kualitas maupun kuantitas barang yang seharusnya diterima oleh KPM, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dapat diberikan mencakup teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan izin sebagai penyedia layanan dalam Program Sembako. Selain itu, jika pelanggaran yang dilakukan bersifat serius dan mengandung unsur pidana, maka pihak yang terlibat dapat dikenakan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sembako. KPM dan pihak-pihak terkait berhak untuk melaporkan setiap bentuk penyimpangan kepada dinas sosial setempat atau instansi berwenang lainnya guna memastikan bahwa bantuan sosial ini benar-benar tersalurkan secara adil dan sesuai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

2.5.1 Mekanisme Penyaluran

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi:

- a. Pendaftaran dan/atau pembukaan rekening oleh Bank Penyalur berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pemberi Bantuan Sosial dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

b. Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui media elektronik, cetak, sosial, jaringan, atau online. Materi yang diajarkan meliputi:

1. Kebijakan dan program sembako
2. Prinsip dan mekanisme pelaksanaan Program Sembako
3. Produk dan cara penggunaan kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk Program Sembako
4. Tata cara penyampaian pengaduan
5. dan pentingnya pemenuhan gizi melalui pemanfaatan bantuan program sembako

a. Proses penyaluran

Bank penyalur menggunakan aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)* untuk mengelola dan memantau penyaluran bantuan sosial. Aplikasi ini bekerja berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk prosedur konfirmasi dan pelaporan data penyaluran bantuan.

Proses penyaluran dana untuk Program Sembako diatur oleh peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan bantuan sosial. Semua langkah dalam penyaluran dana ini harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Setiap keluarga penerima manfaat hanya dapat menggunakan dana bantuan Program Sembako untuk membeli

bahan makanan. Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat diubah menjadi uang tunai.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membeli bahan makanan di *e-warong* sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan dana bantuan Program Sembako yang tersimpan di rekening elektronik mereka. Pembelian dilakukan pertama kali setelah KPM menerima pemberitahuan dari bank. Namun, di beberapa daerah, ada mekanisme khusus yang memungkinkan pembelian dilakukan secara offline sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh bank dan Dinas Sosial setempat. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan *e-warong* sama-sama harus menyimpan bukti pembelian sebagai catatan transaksi.

- b. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

Kartu Kombo memungkinkan penerima bantuan sosial untuk menarik uang tunai atau membeli barang dan jasa sesuai kebutuhan mereka. Dana bantuan sosial yang telah ditransfer akan tersimpan di kartu ini dan dapat digunakan kapan saja di tempat yang menyediakan layanan transaksi menggunakan kartu tersebut.

2.6 Tujuan dan Manfaat Program Sembako

Program Sembako bertujuan untuk

- a. Mengurangi biaya KPM dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan

- b. Memberikan makanan yang seimbang secara gizi
- c. Memberikan makanan dengan tepat waktu, umlah, kualitas, harga, dan administrasi
- d. Memberikan KPM lebih banyak pilihan dan kontrol untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan :

- a. Ketahanan pangan sebagai sarana perlindungan sosial, pencegahan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrim di tingkat KPM
- b. Fungsi KPM melalui penerapan prinsip KPM, oleh KPM, dan untuk KPM
- c. Seberapa efektif bantuan sosial diberikan
- d. Kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan dan keuangan
- e. Transaksi nontunai
- f. Pertumbuhan ekonomi lokal, terutama usaha perdagangan mikro dan kecil.
- g. Meningkatkan pemenuhan gizi sehingga orang tidak stunting.

2.7 Indikator Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Untuk menilai efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, seseorang dapat menggunakan berbagai metrik. Beberapa di antaranya:

a. Tepat Sasaran

Keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar harus menerima bantuan agar program bantuan pangan berjalan lancar. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa bantuan sampai ke orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.

b. Tepat Jumlah

Jumlah bahan pangan yang disalurkan dalam program bantuan sosial harus dipastikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.

c. Tepat Waktu

Bantuan harus diberikan sesuai jadwal dan tepat waktu agar program bantuan pangan berjalan lancar. Bantuan dapat tertunda dan tidak efektif.

d. Tepat Kualitas

Makanan yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan penerima manfaat. Akibatnya, bahan pangan yang dikirim harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

e. Tepat Administrasi

Proses manajemen bantuan pangan harus dilakukan dengan cara yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua tahapan administrasi berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahan.

2.8 Masyarakat Kurang Mampu

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingginya angka kemiskinan mencerminkan adanya ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi yang memerlukan penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat kurang mampu, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka (Syafitri & Ramadhani, 2024). Kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga faktor sosial dan politik. Untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efektif, pemerintah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi masyarakat. Data yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan (Erlia Harahap, 2023).

Program bantuan sosial, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana atau kesulitan lainnya. Bantuan ini bisa berupa uang, makanan, atau bentuk bantuan lainnya (Ali Hasymi et al., 2021).

2.9 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah struktur pemikiran yang dibangun oleh peneliti berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu, dan

informasi lainnya. Struktur ini menjelaskan bagaimana berbagai konsep saling terkait dan membentuk sebuah pemahaman yang utuh tentang topik yang diteliti.

Menurut Suriasumanti (dalam Sugiyono 2015:128) "Kerangka pemikiran ini adalah sebuah hipotesis awal yang mencoba menjelaskan fenomena atau masalah yang sedang kita teliti."

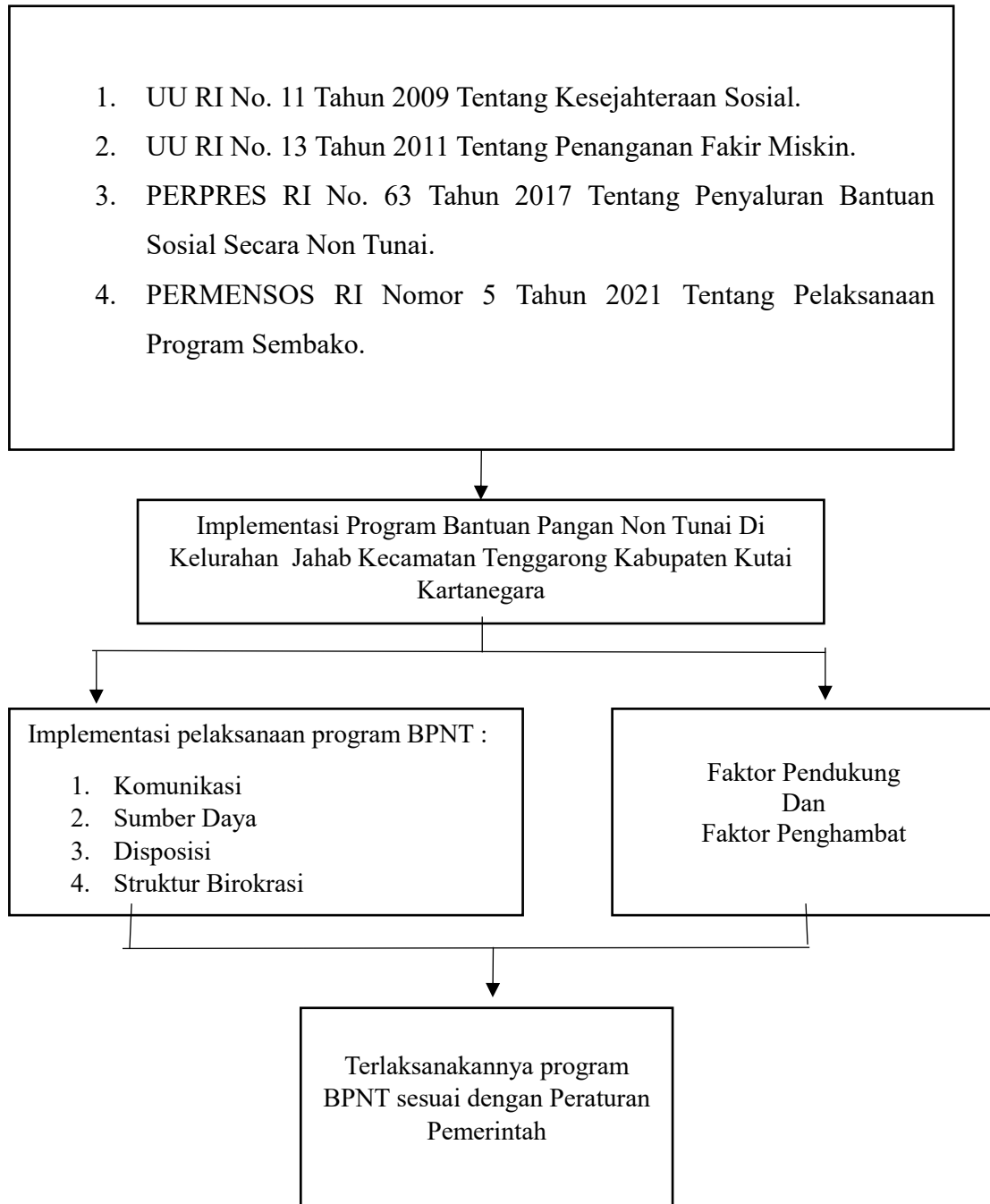
Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono 2016:91) "Kerangka berpikir adalah sebuah gambaran yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep teoritis dapat dihubungkan dengan berbagai faktor yang dianggap penting dalam suatu masalah penelitian."

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa "Kerangka berpikir adalah sebuah gambaran yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep dalam teori bisa dihubungkan dengan berbagai hal yang dianggap penting dalam masalah yang kita teliti."

Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:68) "Kerangka berpikir adalah semacam peta jalan yang dibuat oleh peneliti untuk menjelaskan masalah yang ingin diteliti. Peta jalan ini dibuat dengan menggabungkan teori-teori yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya."

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jahab dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diterapkan atau diterapkan di Kelurahan Jahab. Untuk membuat penelitian

lebih mudah dipahami, peneliti menjelaskan kerangka pemikiran mereka sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Sumber: Dibuat oleh Peneliti 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Suatu kegiatan biasanya dilakukan dengan perencanaan, karena itu akan berjalan dengan cara yang sistematis. Peneliti merencanakan jadwal penelitian, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini; berikut, peneliti menyampaikan pendapat para ahli tentang jadwal penelitian.

Secara sederhana, jadwal penelitian adalah merencanakan kegiatan untuk ditargetkan selama penelitian. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014;73), "tanggal, bulan, dan tahun, dimana penelitian dilakukan" adalah "waktu penelitian". Namun, Sugiyono (dalam Andi Prastowo 2016;48) menyatakan bahwa karena tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menghasilkan penemuan, penelitian kualitatif membutuhkan waktu yang lebih lama.

Selanjutnya menurut Stainback yang dikutip Andi Prastowo (2016;48) menyatakan bahwa “Durasi penelitian kualitatif sangat bervariasi dan tidak bisa ditentukan secara pasti. Banyak faktor yang mempengaruhi lamanya waktu penelitian, seperti ketersediaan sumber data, minat peneliti, dan kompleksitas masalah yang diteliti. Selain itu, cakupan penelitian dan efisiensi peneliti dalam mengatur waktu juga berperan penting”.

Berdasarkan teori yang dijelaskan para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa jadwal penelitian adalah berisi tahapan waktu penelitian dalam bentuk tanggal, bulan, tahun. Adapaun jadwal penelitian atau tahapan

penelitian ini ditentukan dalam tanggal, bulan, tahun, serta penjelasan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Agenda	Jadwal Penelitian				
		Sep – Okt 2023	Agu – Sep 2024	Okt - Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025
1	Observasi					
2	Persetujuan Judul					
3	Penyusunan Bab 1 - 3					
4	Penelitian lapangan					
5	Penyusunan Hasil Penelitian					
6	Seminar Hasil					
7	Pendadaran					

Sumber: Dibuat oleh Peneliti.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dibahas serta tujuan penelitian di Bab I. Pendekatan deskriptif kualitatif mengacu pada jenis penelitian yang menggambarkan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta atau kondisi alami.

Menurut Sugiyono (2017;2) “Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dan reliabel guna menjawab pertanyaan penelitian. Empat komponen utama dalam metode penelitian adalah cara pengumpulan data, jenis data yang

dikumpulkan, tujuan penelitian, dan kegunaan dari hasil penelitian tersebut”.

Menurut Sunyoto (2016:21) “menyatakan bahwa jenis data terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif”.

- a. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang pasti. Data ini lebih objektif dan mudah dianalisis secara statistik dibandingkan dengan data kualitatif.
- b. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan perbedaan pendapat, perasaan, atau pengalaman individu. Data ini seringkali berupa kata-kata, kalimat, atau deskripsi. Meskipun tidak selalu digunakan untuk membuat keputusan langsung oleh peneliti, data kualitatif sangat berharga bagi berbagai pihak, termasuk organisasi atau lembaga lain yang tertarik dengan topik penelitian tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, foto dokumen pribadi, dan lainnya sambil mengamati fenomena langsung yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan secara sistematis dalam kaitannya dengan implementasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Sebelum memulai penelitian, peneliti harus menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu dimana peneliti melakukan tugas

lapangan yang telah ditetapkan sesuai daripada judul. Selanjutnya, berikut beberapa penjelasan menurut para ahli, Menurut Sugiyono (2017;286) mengemukakan bahwa “Desain penelitian yang baik harus mencakup perencanaan waktu yang matang. Jadwal penelitian berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian, mulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir”.

Menurut Suwarma Al Muchtar (2015:243) dan V. Wiratna Sujarweni (2014;73), "Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan," dan "Lokasi penelitian adalah tempat di mana kita akan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data." Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keunikan karakteristik tempat tersebut, relevansi dengan topik penelitian, dan potensi untuk menghasilkan temuan-temuan baru”.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jahab di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berlokasi di Jl. Etam Km 7 dan Kode Pos 75511.

3.4 Definisi Konsepsional

Definisi konseptual merupakan abstraksi yang merumuskan kejadian yang menjadi fokus penelitian. Definisi ini sekaligus membatasi ruang lingkup kajian yang akan dilakukan.

Studi ini melakukan konseptualisasi terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Jahab mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat

memberikan makna terhadap program tersebut melalui lensa kebijakan, pengalaman pribadi, dan pengamatan langsung. Selain itu, studi ini juga berupaya mengungkap fenomena-fenomena yang relevan dengan pelaksanaan BPNT di Kelurahan Jahab, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang.

Menurut Harbani Pasolong (2020:77) menyatakan bahwa "Konsep merupakan abstraksi yang diperoleh dari penggeneralisasian sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh berbagai kejadian, keadaan, kelompok, atau individu".

Menurut Deddy Mulyadi (2015:1) "Konsep merupakan abstraksi yang merepresentasikan karakteristik umum dari sekumpulan objek, peristiwa, atau fenomena".

Menurut Ade Ismayani (2019:48) "Konsep merupakan abstraksi yang merepresentasikan karakteristik umum dari sekumpulan objek atau peristiwa".

Berdasarkan literatur yang ada, definisi konseptual dapat disimpulkan sebagai sebuah abstraksi yang mendasari penelitian. Konsep ini merepresentasikan karakteristik umum dari suatu kelompok objek atau fenomena, dan seringkali didefinisikan melalui relasi dengan konsep-konsep lain.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan upaya pemerintah dalam

menyalurkan bantuan sosial berbasis non-tunai guna meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga penerima manfaat. Secara konseptual, implementasi program ini mencakup berbagai aspek, seperti mekanisme penyaluran bantuan melalui kartu elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di *e-warong* yang telah ditunjuk. Program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pangan berkualitas, sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan tunai langsung. Selain itu, pelaksanaan BPNT juga berorientasi pada transparansi, efisiensi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyediaan bahan pangan. Dengan adanya program ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Jahab dapat meningkat, serta tercipta ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan di tingkat lokal.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif umumnya ditentukan berdasarkan kajian pendahuluan, pengalaman peneliti, literatur terkait, serta masukan dari pembimbing. Fokus penelitian ini bersifat dinamis dan dapat berkembang seiring dengan berjalannya penelitian lapangan.

Menurut Spradley (dalam Sugiyono 2014;288) “Fokus penelitian bisa berupa satu masalah atau beberapa masalah yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan fokus penelitian harus mempertimbangkan hal-hal yang belum banyak diketahui agar penelitian kita memberikan kontribusi yang berarti”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2017;290) "Fokus penelitian didefinisikan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji. Pembatasan ini diperlukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian dapat dilakukan secara mendalam pada aspek-aspek tertentu dari objek penelitian."

Selanjutnya menurut Ridwan (2021:52) "fokus penelitian yaitu upaya terkonsentrasi untuk fokus pada tujuan penelitian dengan berfokus pada keadaan tertentu."

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian adalah garis terbesar dalam penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Maka dari itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

3.6 Sumber Data

Sumber data penelitian dapat berupa hal-hal, orang, atau kejadian yang dapat memberikan informasi tentang subjek penelitian. Informasi ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung atau melalui dokumen yang relevan.

Menurut Sugiyono (2017:104) menyatakan bahwa "Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua sumber utama: data primer dan data sekunder."

Sedangkan, menurut Lofland (dalam Lexy J. Moleong 2016; 157), data verbal (kata-kata) dan non-verbal adalah sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Selain itu, hasil penelitian juga dapat diperkaya dengan data tambahan seperti dokumen tertulis, foto, dan data statistik.

Sumber data merupakan komponen krusial dalam penelitian. Penjelasan mengenai asal-usul data sangat penting untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Untuk penelitian lapangan ini, peneliti membutuhkan data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif, di antaranya:

3.6.1 Sumber Data Primer

Data asli yang diperoleh peneliti secara langsung melalui metode pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi dikenal sebagai data primer. Ini adalah sumber utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian.

Menurut Sumadi Surybrata (2014;39), Data primer didefinisikan sebagai data asli yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau tim penelitian dari sumber pertama.

Adapun menurut Sugiyono (2014:187) menyatakan bahwa "Data primer merujuk pada data asli yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama."

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015:225), "Data primer merujuk pada data asli yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi."

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa data langsung yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui dokumentasi dan wawancara adalah sumber utama. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informasi purposive dan random sampling digunakan. Metode-metode ini mempermudah peneliti dalam menentukan *Informant* penting dan *Informant*. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 2 Sumber Data Primer

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Laoren Sirenden S.Sos	Lurah	<i>Key Informant</i>
2.	Sri	Pendamping BPNT	<i>Key Informant</i>
3.	Mariam Sumarni	Masyarakat	<i>Informant</i>
4.	Magdalena Sara	Masyarakat	<i>Informant</i>
5.	Helda Pindan	Masyarakat	<i>Informant</i>
6.	Riri Gunarti	Masyarakat	<i>Informant</i>
7.	Ribka Dambu	Masyarakat	<i>Informant</i>

- a. *Key informant* pada penelitian ini adalah Lurah Jahab Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pendamping BPNT. (*Purposive sampling*)
- b. *Informant* pada penelitian ini adalah 5 orang perwakilan dari penerima BPNT Di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. (*Random Sampling*)

Menurut Sugiyono (2015;368) "*Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana pemilihan sampel didasarkan pada kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria ini dapat meliputi pengetahuan, pengalaman, atau peran sosial individu dalam konteks penelitian."

3.6.2 Sumber Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan didokumentasikan dalam berbagai format, seperti laporan, buku, atau catatan, yang berkaitan dengan subjek penelitian disebut sebagai data sekunder.

Menurut Sumadi Suryabrata (2014;39) "Data sekunder umumnya disajikan dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis yang berisi informasi mengenai berbagai aspek, seperti demografi, produktivitas institusi, atau ketersediaan sumber daya".

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015;187), data pendukung yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan

dokumen arsip disebut sebagai sumber data sekunder, dan digunakan untuk menyempurnakan data awal dan memberikan konteks yang lebih luas untuk hasil penelitian.

Adapun data-data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Profil Kelurahan Jahab
- b. Buku-buku Ilmiah
- c. Literatur lainnya seperti jurnal, artikel dan dokumen

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Gunakan metode pengumpulan data yang tepat untuk mendapatkan data yang ideal dan sesuai dengan harapan.

Menurut Sugiyono (2017;224), "Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian, mengingat tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan dan valid."

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2014; 58), "Teknik pengumpulan data merupakan metode sistematis yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian".

Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2014;308), "Teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam proses penelitian, mengingat tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang relevan dan valid."

Untuk mendapatkan data yang optimal dan sesuai dengan harapan, gunakan metode pengumpulan data yang tepat.

Dari pendapat para ahli diatas maka teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah :

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2014;309) menyatakan bahwa, observasi merupakan fondasi utama dalam seluruh kegiatan ilmiah. Data yang diperoleh melalui observasi menjadi landasan bagi pengembangan teori dan pengetahuan.

Berdasarkan pemahaman ini, observasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan langsung fenomena sosial di lapangan, khususnya terkait dengan implementasi Program BPNT di Kelurahan Jahab.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2014; 316) "Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang mendalam mengenai suatu topik tertentu".

Proses pengumpulan data kualitatif yang dikenal sebagai wawancara melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan *informant*. Peneliti mendapatkan informasi awal tentang topik penelitian mereka melalui percakapan yang terstruktur.

3. Dokumentasi

Menurut Burhan Bungin (2014;124) Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan analisis

terhadap dokumen-dokumen historis untuk memperoleh informasi mengenai fenomena sosial di masa lalu.

Dokumen merupakan sumber data sekunder yang berharga dalam penelitian ini. Baik itu foto, gambar, atau teks tertulis, dokumen-dokumen ini dapat memberikan bukti empiris yang relevan dengan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Jahab.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah tahap penting dalam penelitian kualitatif. Ini melibatkan pengorganisasian, klasifikasi, dan interpretasi data dari berbagai sumber, seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi, dengan tujuan menemukan makna dan pola yang tersembunyi dalam data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2015:402) "Analisis data merupakan proses sistematis yang melibatkan pengorganisasian, klasifikasi, dan interpretasi data kualitatif. Melalui analisis data, peneliti dapat mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang mendasari fenomena yang diteliti".

Sedangkan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2018:246), "Analisis data kualitatif merupakan proses yang iteratif dan berkelanjutan. Peneliti akan terus berinteraksi dengan data hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika tidak ada lagi temuan baru yang signifikan".

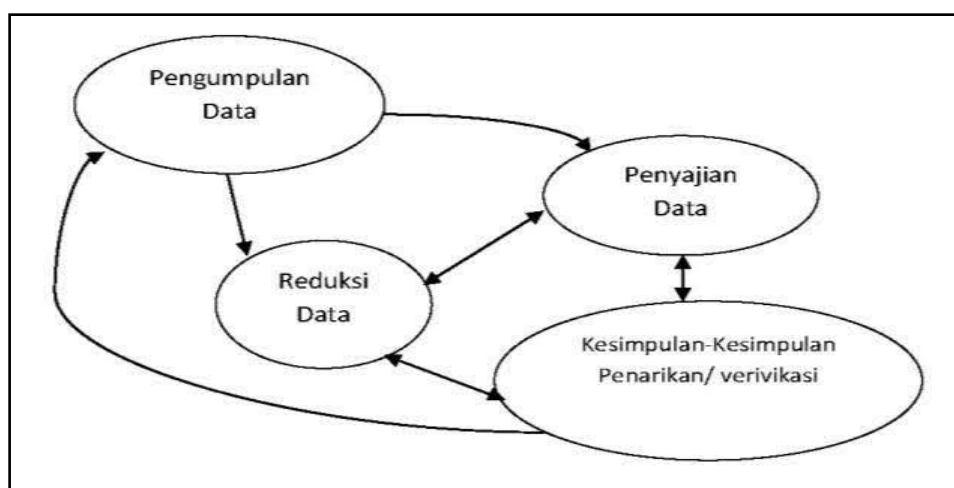
Selanjutnya menurut Spradley (dalam Sugiyono 2017:244) "Analisis merupakan proses berpikir sistematis yang bertujuan untuk mengurai suatu

fenomena menjadi komponen-komponen penyusunnya, serta mengidentifikasi hubungan antar komponen tersebut".

Berdasarkan beberapa penjelasan para ahli di atas, jelas bahwa data kualitatif adalah analisis yang terdiri dari pengurangan data, penyampaian data, penarikan kesimpulan, atau verifikasi data, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut:

Teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles *and* Huberman (dalam Sugiyono, 2019:322), yang terdiri dari :

Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman, (dalam Sugiyono 2019:322)

3.8.1 Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Penelitian ini akan mengumpulkan sejumlah besar data kualitatif melalui penggunaan teknik pengumpulan data intensif seperti observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

Menurut Sugiyono (2015:375) "Teknik pengumpulan data dalam penelitian secara umum dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu observasi, wawancara, analisis dokumen, dan triangulasi".

Menurut Sugiyono (2018:224) menyatakan bahwa "Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, dan data sekunder, yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, dapat dikumpulkan melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen."

3.8.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2015:405), "Reduksi data merupakan proses menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan topik utama dan pola yang muncul dalam data, yang memudahkan analisis lebih lanjut".

Menurut Sugiyono (2018:247) "'Jumlah data yang diperoleh dari penelitian lapangan cenderung sangat besar dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan proses reduksi data untuk menyederhanakan dan mengorganisasikan data agar lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan".

3.8.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:408), "Selain penyajian data dalam bentuk naratif, data kualitatif dapat juga

disajikan dalam bentuk visual seperti grafik, matriks, dan diagram jaringan untuk memperjelas pola dan hubungan antar data."

Menurut Sugiyono (2018:249) menyatakan bahwa "Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk visual, seperti tabel, grafik, atau diagram, untuk memudahkan interpretasi dan analisis.

3.8.4 Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015:412), "Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif dan dapat berubah seiring dengan bertambahnya data."

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang bagaimana pemerintahan Kelurahan melayani masyarakat Kelurahan Jahab akan dibahas dan dievaluasi dalam bab ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kondisi pelayanan pemerintahan Kelurahan.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, Kelurahan Jahab. Informasi yang disajikan meliputi letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, serta beberapa karakteristik penting lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4.2 Letak Geografis

Kelurahan Jahab merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada dalam Wilayah Administratif Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, berbatasan dengan Kelurahan Loa Ipuh di sebelah Utara, Kelurahan Loa Kulu di sebelah Selatan, Kelurahan Timbau di sebelah Timur, Kelurahan Loa Ipuh Darat di sebelah Barat. Dengan luas wilayah 161,51 ha/m², terdiri dari 18 wilayah Kecamatan, dan 14 Kelurahan (Sumber : Profil Kelurahan Jahab).

Pada bagian ini, peneliti sajikan gambaran umum yang bersumber dari dukungan berupa profil Kelurahan Jahab Tahun 2023. Berdasarkan

profil Kelurahan Jahab Tahun 2023, Salah satu dari empat belas kelurahan di

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kelurahan Jahab. Jumlah penduduk Kelurahan Jahab yaitu 4.609 jiwa atau dengan rincian Laki-Laki berjumlah 2.128 orang, sedangkan perempuan 2.481 orang dengan jumlah Kepala Keluarga 1.317 KK.

4.2.1 Luas Wilayah

Kelurahan Jahab memiliki luas 161.51 ha per meter persegi.

Area ini berada di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas wilayah ini memungkinkan pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang dapat lebih menjangkau masyarakat.

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

4.2.2 Batas Wilayah

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Loa Ipuh

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Loa Kulu

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Timbau

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Loa Ipuh Darat

4.2.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Jahab meningkat setiap tahunnya, yang pasti menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Kelurahan Jahab juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Dengan total populasi sebanyak 4.609 jiwa, Kelurahan ini menjadi rumah bagi sejumlah masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Tenggarong.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Jahab

No	Jenis Kelamin	Orang
1.	Laki-Laki	2.128
2.	Perempuan	2.481
Jumlah Keseluruhan		4.609

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

Penduduk di Kelurahan Jahab didominasi oleh perempuan, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tersebut sangat signifikan. Dengan jumlah yang lebih besar, perempuan di Kelurahan Jahab berkontribusi dalam berbagai sektor, baik sebagai ibu rumah tangga, pekerja, maupun pelaku usaha.

4.2.4 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan dari paling rendah hingga jenjang sarjana di data oleh Pemerintah Kelurahan Jahab berdasarkan hasil dari laporan Ketua RT Kelurahan Jahab pada setiap bulan. Jumlah penduduk berdasarkan angka pendidikan menjadi standar kualitas sumber daya manusia yang ada di setiap Kelurahan.

Pada tabel dibawah ini dapat kita ketahui jumlah penduduk Kelurahan Jahab menurut tingkat pendidikan pada Tahun 2023, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.2 Penduduk Kelurahan Jahab Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Orang
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	303
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	32
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	15
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	610
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	74
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tdk tamat	29
7	Tamat SD/ sederajat	860
8	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	83
9	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	158
10	Tamat SMP/ sederajat	939
11	Tamat SMA/ sederajat	1.070
12	Tamat D-1/ sederajat	89
13	Tamat D-2/ sederajat	89
14	Tamat D-3/ sederajat	262
15	Tamat S-1/ sederajat	102
16	Tamat S-2/ sederajat	22
17	Tamat S-3/ sederajat	-
18	Tamat SLB A	1
19	Tamat SLB B	-
20	Tamat SLB C	-
Jumlah Total		4.609

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

Data di atas jumlah penduduk terdata berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan Jahab menurut Pendidikan adalah 4.609 Orang.

4.2.5 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Karakteristik penduduk Kelurahan Jahab juga dapat dilihat melalui kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Data menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Jahab memiliki beragam kepercayaan dan agama yang menjadi landasan spiritual dan kehidupan mereka. Berdasarkan data/informasi yang tersedia. Ditemukan variasi dalam kepercayaan yang dianut oleh penduduk Kelurahan Jahab sebagai berikut :

Tabel 4.3 Penduduk Kelurahan Jahab Menurut Agama

No	Agama	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Islam	999	1.122
2.	Kristen	973	1.301
3.	Katholik	101	110
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	2	1
6.	Khonghucu	-	-
	Jumlah	2.075	2.534
Jumlah Keseluruhan		4.609	

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

Kelurahan Jahab memiliki keberagaman dalam aspek keagamaan, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Kristen sejumlah 2.274 dan agama Islam sejumlah 2.121. Kedua agama ini memiliki jumlah pemeluk terbanyak dibandingkan dengan agama lainnya di wilayah tersebut.

4.2.6 Berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian

Karakteristik penduduk Kelurahan Jahab juga dapat dipahami melalui prisma pekerjaan atau mata pencaharian mereka. Data menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Jahab dalam berbagai sektor ekonomi yang mencerminkan keragaman mata pencaharian di wilayah tersebut. Dalam kelurahan ini, terdapat sebagian penduduk yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, pedagang kecil, karyawan swasta. Mereka cenderung memiliki mata pencaharian yang lebih fleksibel dan bergantung pada kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar.

Pekerjaan atau mata pencaharian ini mencerminkan dinamika ekonomi yang ada di Kelurahan Jahab. Keragaman sektor pekerjaan ini juga dapat berdampak pada pendapatan dan taraf hidup penduduk. Pemerintah Kelurahan Jahab perlu memahami karakteristik ini dalam merancang kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik penduduk berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian dapat membantu dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Dengan demikian, pemerintah Kelurahan Jahab dapat mendorong peningkatan kualitas hidup penduduk melalui peningkatan akses dan peluang dalam dunia kerja. Dari data penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis

pekerjaan/mata pencarian di Kelurahan Jahab dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.4 Penduduk Kelurahan Jahab Menurut Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Petani	297	94
2.	Buruh Tani	14	5
3.	Buruh migran perempuan	-	-
4.	Buruh migran laki-laki	-	-
5.	Pegawai Negeri Sipil	40	25
6.	Pengrajin industri rumah tangga	-	-
7.	Pedagang keliling	39	40
8.	Peternak	520	-
9.	Nelayan	-	-
10.	Montir	10	-
11.	Dokter swasta	-	-
12.	Bidan swasta	1	-
13.	Perawat swasta	1	2
14.	Pembantu rumah tangga	-	-
15.	TNI	3	-
16.	POLRI	8	-
17.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3	-
18.	Pengusaha kecil dan menengah	3	-
19.	Pengacara	1	-
20.	Notaris	-	-
21.	Dukun kampung terlatih	-	5
22.	Jasa pengobatan alternatif	-	1
23.	Dosen swasta	1	-
24.	Pengusaha besar	-	-

Bersambung...

Lanjutan...

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
25.	Arsitektur	-	-
26.	Seniman/artis	-	-
27.	Karyawan perusahaan swasta	80	20
28.	Karyawan perusahaan pemerintah	-	-
Jumlah		1.021	192
Jumlah Total Penduduk			1.213

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

Data di atas jumlah penduduk terdata berdasarkan mata pencaharian adalah 1.213 orang, sisanya dalam proses pendataan oleh pihak pemerintah Kelurahan Jahab.

4.2.7 Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Infrastruktur dan fasilitas umum sangat penting untuk mendukung kinerja pemerintahan kelurahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kelurahan Jahab telah mengembangkan sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut ini adalah beberapa infrastruktur dan fasilitas umum yang ada di Kelurahan Jahab sebagai berikut:

a) Jaringan Jalan

Kelurahan Jahab dilengkapi dengan jaringan jalan yang terhubung dengan baik, termasuk jalan utama yang menghubungkan dengan wilayah sekitar. Jalan-jalan tersebut

dirawat secara berkala untuk memastikan aksesibilitas yang lancar bagi penduduk dan kendaraan.

Tabel 4. 5 Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
1	Panjang jalan aspal	7 km	-
2	Panjang jalan konblok/semen/beton	3 km	-
3	Jembatan Beton	1 unit	-
4	Jembatan Kayu	5 unit	-

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

Di Kelurahan Jahab, infrastruktur jalan terdiri dari 7 km jalan beraspal dan 3 km jalan berbahan konblok, semen, atau beton, yang mendukung mobilitas warga serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Selain itu, terdapat enam jembatan yang berperan penting dalam konektivitas antarwilayah, terdiri dari satu jembatan beton yang lebih kokoh dan tahan lama, serta lima jembatan kayu yang masih digunakan untuk akses harian. Infrastruktur ini memainkan peran vital dalam meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

b) Sarana Peribadahan

Di Kelurahan Jahab, sarana peribadahan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Tersedia beberapa tempat ibadah yang mendukung berbagai

aktivitas keagamaan, seperti masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, yang tidak hanya menjadi tempat untuk beribadah.

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Ibadah

No.	Jenis Sarana dan Prasarana Peribadahan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	1
2.	Langgar/Surau/Mushola	3
3.	Gereja Kristen Protestan	14
4.	Gereja Katholik	1
5.	Wihara	-
6.	Pura	-
7.	Klenteng	-
Jumlah		19

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

Di Kelurahan Jahab, terdapat berbagai sarana peribadahan yang mencerminkan keragaman agama dan kepercayaan masyarakat. Masjid menjadi pusat ibadah utama dengan satu unit yang melayani umat Islam. Selain itu, terdapat tiga langgar, surau, atau mushola yang digunakan untuk kegiatan ibadah sehari-hari. Untuk umat Kristiani, terdapat 14 gereja Kristen Protestan dan satu gereja Katholik yang melayani kebutuhan ibadah mereka. Meskipun begitu, saat ini belum ada sarana peribadahan untuk umat Buddha, Hindu, maupun Konghucu di wilayah ini. Keberagaman ini menciptakan lingkungan yang inklusif, dengan setiap tempat ibadah berfungsi

sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat setempat.

c) Pusat Kesehatan

Pusat kesehatan di Kelurahan Jahab menyediakan layanan kesehatan umum. Fasilitas ini meliputi puskesmas pembantu, posyandu, toko obat, balai kesehatan ibu dan anak.

Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Rumah sakit umum	-
2.	Puskesmas	-
3.	Puskesmas pembantu	1
4.	Poliklinik/balai pengobatan	-
5.	Apotik	-
6.	Posyandu	6
7.	Toko obat	1
8.	Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	-
9.	Gudang menyimpan obat	-
10.	Rumah/kantor praktek dokter	-
11.	Rumah bersalin	-
12.	Balai kesehatan ibu dan anak	1
13.	Rumah sakit mata	-
Jumlah		9

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

Di Kelurahan Jahab, fasilitas kesehatan yang tersedia mencakup satu Puskesmas pembantu, enam Posyandu, satu toko obat, serta satu balai kesehatan ibu dan anak. Meskipun tidak

terdapat rumah sakit umum, poliklinik, atau rumah sakit mata, keberadaan Puskesmas pembantu dan Posyandu memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Selain itu, rumah atau kantor praktek dokter dan balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta juga belum ada di wilayah ini, namun fasilitas yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk setempat.

d) Sarana Olahraga

Penduduk Kelurahan Jahab juga memiliki akses terhadap sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan bulutangkis, lapangan voli, dan meja pimpong. Fasilitas ini mendukung gaya hidup aktif dan sehat bagi penduduk.

Tabel 4. 8 Sarana dan Prasarana Olahraga

No.	Jenis Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah (Unit)
1.	Lapangan sepak bola	1
2.	Lapangan bulutangkis	3
3.	Meja pimpong	1
4.	Lapangan tenis	-
5.	Lapangan voli	3
6.	Lapangan golf	-
7.	Pacuan kuda	-
8.	Arum jeram	-
9.	Lapangan basket	-
10.	Pusat kebugaran	-
11.	Gelanggang remaja	-
Jumlah		8

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

e) Pendidikan

Di Kelurahan Jahab, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tersedia berbagai sarana pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar.

Tabel 4.9 Sarana Pendidikan

No.	Jenis	Sewa (Unit)	Milik Sendiri (Unit)
1.	Gedung kampus PTN	-	-
2.	Gedung kampus PTS	-	-
3.	Gedung SMA/ sederajat	-	-
4.	Gedung SMP/ sederajat	-	1
5.	Gedung SD/ sederajat	-	3
6.	Gedung TK	-	3
7.	Gedung tempat bermain anak	-	-
8.	Jumlah lembaga pendidikan agama	-	2
9.	Jumlah perpustakaan keliling	-	-
10.	Perpustakaan desa/ kelurahan	-	1
11.	Taman bacaan	-	-
Jumlah			10

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

Kelurahan Jahab memiliki beberapa sarana pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar bagi anak-anak di wilayah tersebut. Sarana pendidikan yang tersedia meliputi Gedung SMP sebanyak 1, Gedung SD sebanyak 3, dan Gedung TK sebanyak 3, yang masing-masing berperan dalam memberikan pendidikan sesuai jenjangnya.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Penjelasan dari pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai berikut :

4.3.1 Tugas Dan Fungsi Kelurahan

- a. Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten atau kota yang berada di wilayah kecamatan.
- b. Kelurahan dipimpin oleh lurah, yang bertanggung jawab kepada camat dan berada di bawah Bupati atau Walikota.
- c. Lurah dipilih oleh bupati atau walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- d. Lurah bertanggung jawab untuk mengatur urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- e. Lurah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati atau walikota kepada mereka.
- f. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan untuk menjadi lebih efisien dan lebih akuntabel.
- g. Pelimpahan sarana, prasarana, pembiayaan, dan staf dilakukan oleh pemerintah.
- h. Dalam melaksanakan tugas utamanya, lurah bertanggung jawab atas hal-hal berikut:
 - 1) Melakukan tindakan yang terkait dengan pemerintahan kelurahan
 - 2) Memperkuat komunitas

- 3) Layanan pemerintah
- 4) Menjaga keamanan umum
- 5) Pemeliharaan layanan publik dan prasarana
- 6) Membangun kelompok masyarakat.

4.3.2 Tugas Dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

- a. Menyusun program kerja kelurahan
- b. Mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan ketatausahaan
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi di kelurahan
- d. Menyusun laporan kegiatan kelurahan
- e. Mengelola urusan kesekretariatan.

4.4 Visi Dan Misi Kelurahan Jahab

4.4.1 Visi

Visi adalah gambaran dan tujuan suatu organisasi, yang mencakup nilai, impian, atau organisasi. Visi adalah tujuan masa depan yang terdiri dari ide-ide dan harapan dari semua aspek suatu organisasi atau lembaga. Visi Kelurahan Jahab adalah membangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

4.4.2 Misi

Setelah mengetahui dan menetapkan visi, hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah menetapkan proses atau tahapan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi agar dapat mencapai visi, uraian tahapan inilah yang disebut dengan misi. Selanjutnya, pernyataan visi dimasukkan ke dalam misi agar dapat dioprasionalkan. Berikut ini adalah tujuan Kelurahan Jahab:

a. Perubahan Birokrasi

Memantapkan reformasi birokrasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

b. Tenaga Kerja Berpengalaman

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten.

c. Pembiayaan Daerah

Menambah dana untuk pembangunan daerah.

d. Pertanian dan Pariwisata

Meningkatkan pengelolaan sektor pertanian dan pariwisata untuk mempercepat transformasi ekonomi sebuah daerah.

e. Infrastruktur dan Daya Saing

Menggabungkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah.

f. Kelangsungan SDA

Meningkatkan metode pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

g. Perempuan dan Anak

Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengasuh anak dan meningkatkan perlindungan anak.

4.5 Sumber Daya Manusia di Kantor Kelurahan Jahab

Pada Kantor Kelurahan Jahab, terdapat 20 orang pegawai yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut.

Tabel 4.10 Pegawai Kelurahan Jahab

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Laoren Sirenden, S.Sos.	Lurah Jahab	Strata 1	L
2.	Harry Prastowo, S.STP.	Sekretaris Lurah	Strata 1	L
3.	Ibram, S.Sos	Kasi Pembangunan	Strata 1	L
4.	Jaunuri, S.Sos.	Kasi Sosial	Strata 1	L
5.	Awang Ifhan, S.Sos.	Staf Pembangunan	Strata 1	L
6.	M.Luthfi Azhari, SE.	Staf Pembangunan	Strata 1	L
7.	Jamhan	Sekretariat	SMA	L
8.	Mohammad Jirin	Staf Sosial	SMA	L
9.	Eddy Duan Syahrani	Staf Sosial	SMA	L
10.	Fatmawati	Staf Pemerintah	SMA	P

Bersambung...

Lanjutan...

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
10.	Fatmawati	Staf Pemerintah	SMA	P
11.	Dedi Piko	Staf Pemerintah	SMA	L
12.	Jupri	Bendahara	SMA	L
13.	Damaris Kendek	Staf Pembangunan	SMA	P
14.	Yuliana Jum'ah	Staf Sosial	SMA	P
15.	Yulius Jumiran	Sekretariat	SMA	L
16.	Komaruddin Gustaman	Sekretariat	SMA	L
17.	Ahrariah	Staf Pemerintah	SMA	P
18.	Sri Herlinda	Sekretariat	SMA	P
19.	Emmy Tri Hariyati	Staf Sosial	SMA	P
20.	Syarifudin	Staf Sosial	SMA	L

Sumber: Profil Kelurahan Jahab Tahun 2023

4.5.1 Pegawai Kelurahan

Pegawai kelurahan adalah aparatur pemerintah yang bertugas di tingkat kelurahan untuk membantu lurah dalam menjalankan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di lingkungan masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek, termasuk pencatatan kependudukan, pengelolaan surat-menyurat, perizinan, serta koordinasi program sosial dan pembangunan wilayah. Selain itu, pegawai kelurahan juga berperan

sebagai penghubung antara warga dengan pemerintah daerah, memastikan kebijakan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Dalam menjalankan tugasnya, mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti RT/RW, tokoh masyarakat, dan instansi lain, guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sejahtera. Profesionalisme, kedisiplinan, serta kemampuan komunikasi yang baik menjadi faktor penting bagi pegawai kelurahan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

4.6 Penyajian Data Hasil Penelitian

Persiapan yang matang dan komprehensif diperlukan untuk mengumpulkan data yang jelas dan akurat untuk menghasilkan hasil penelitian yang optimal dan sesuai dengan tujuan peneliti. Persiapan tersebut meliputi serangkaian langkah yang harus dilakukan sebelum proses pengumpulan data dimulai. Tahapan awal yang penting adalah melakukan observasi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konteks penelitian.

Selain itu, selama proses persiapan penelitian, peneliti harus mengumpulkan literatur dan dokumen pendukung yang dapat memberikan landasan teoritis dan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen ini dapat berupa kebijakan pemerintah, laporan riset sebelumnya, jurnal ilmiah, buku referensi, atau sumber informasi lainnya yang relevan. Dengan memiliki dasar yang kuat dari literatur dan dokumen, peneliti dapat menyusun garis besar penelitian yang sistematis dan terarah.

Setelah persiapan awal selesai, peneliti menggunakan berbagai teknik penelitian yang sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan. Salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara langsung mengamati dan mencatat peristiwa yang terjadi di lingkungan yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari responden yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan. Dokumentasi, di sisi lain, melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis seperti dokumen resmi, catatan, atau arsip yang berkaitan dengan topik penelitian

Setelah semua data dikumpulkan, peneliti melakukan analisis data, yang mencakup pengolahan, pemilihan, dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan metode yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, seperti analisis kualitatif atau kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara langsung di lapangan akan disajikan dengan cermat sesuai dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang telah diperoleh akan diolah dan disusun secara terstruktur sehingga dapat menghasilkan temuan dan kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh peneliti, peneliti melakukan wawancara dengan 2 *Key informant* yaitu Bapak Lurah Jahab selaku Lurah Jahab dan Ibu Sri Suhariyati, S.Sos selaku

pendamping BPNT dan 5 orang *Informant* diantaranya, Ibu Helda Pindan, Ibu Ribka Dambu, Ibu Mariam Sumarni, Ibu Magdalena Sara dan Ibu Riri Gunarti. Berikut hasil wawancara tersebut yang disajikan berdasarkan variabel penelitian yang digunakan

1. Komunikasi

a. Menurut *key informant* : Bapak Lurah Laoren Sirenden, S. Sos.

- 1) Menurut Bapak apakah masyarakat penerima bantuan sudah mengetahui kegunaan dari bantuan tersebut?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Iya tentu saja, sebagian besar masyarakat penerima bantuan sudah mengetahui kegunaan dari bantuan tersebut. Namun, ada juga yang mungkin masih perlu penjelasan lebih lanjut, terutama jika bantuan yang diberikan berbentuk program baru atau memiliki aturan yang berbeda dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi pihak pemberi bantuan untuk memberikan sosialisasi yang jelas, sehingga semua penerima benar-benar paham bagaimana memanfaatkan bantuan tersebut secara maksimal untuk kebutuhan mereka." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Bapak bagaimana cara agar masyarakat menerima bantuan dapat mengetahui informasi mengenai informasi BPNT?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Salah satu cara yang efektif adalah melalui sosialisasi langsung di tingkat desa atau kelurahan, misalnya melalui pertemuan warga, posyandu, atau kegiatan rutin lainnya. Selain itu, informasi juga bisa disampaikan melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp warga, spanduk, atau pengumuman di tempat-tempat umum seperti balai desa atau masjid. Penting juga untuk melibatkan perangkat desa, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat agar

informasi yang disampaikan lebih dipercaya dan mudah dipahami. Jangan lupa, informasi harus diberikan dengan jelas dan transparan, termasuk siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya, dan apa saja manfaat dari BPNT." (Wawancara, 15 November 2024)

- 3) Menurut Bapak metode/cara apa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penerima bantuan agar tersampaikan dengan baik?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Menurut saya, metode komunikasi yang paling efektif adalah kombinasi antara komunikasi langsung dan penggunaan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Pertama, pertemuan tatap muka seperti musyawarah desa atau sosialisasi kelompok sangat penting, karena di situ penerima bantuan bisa langsung bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Kedua, memanfaatkan teknologi seperti grup WhatsApp, SMS, atau panggilan telepon juga sangat membantu, terutama untuk menyampaikan informasi yang sifatnya mendesak. Selain itu, pendamping sosial juga bisa melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah penerima untuk memastikan mereka memahami informasi yang disampaikan. Kuncinya adalah penyampaian yang jelas, bahasa yang sederhana, dan pendekatan yang ramah agar pesan bisa diterima dengan baik." (Wawancara, 15 November 2024)

- 4) Menurut Bapak apakah untuk memberikan informasi itu harus mendaftar masyarakat, usahanya bagaimana pak apakah mendaftar atau Bapak Lurah dan tim nya turun ke masyarakat?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Menurut saya, sebaiknya dilakukan pendekatan kombinasi. Artinya, selain masyarakat didorong untuk mendaftar secara mandiri, pihak kelurahan dan timnya juga perlu turun langsung ke masyarakat. Tidak semua warga memiliki akses atau pemahaman yang cukup untuk mendaftar sendiri, terutama warga yang tinggal di daerah terpencil atau yang kurang terpapar teknologi. Dengan

turun langsung ke masyarakat, Bapak Lurah dan timnya bisa memastikan bahwa informasi sampai ke seluruh lapisan, termasuk mereka yang mungkin terlewat. Pendekatan ini juga mencerminkan kepedulian dan memudahkan warga yang benar-benar membutuhkan untuk mendapatkan bantuan dengan lebih cepat dan tepat sasaran." (Wawancara, 15 November 2024)

b. Menurut *key informant* : Ibu Sri Suhariyati, S. Sos Pendamping BPNT

1) Menurut Ibu, bagaimana cara menyampaikan informasi kepada penerima program BPNT, apakah ada metode/cara khusus yang Ibu gunakan?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan:
 “Sebenarnya tidak ada metode atau cara khusus. Biasanya kami hanya menyampaikan pemberitahuan ke masing-masing kelurahan saja. Kelurahan yang melanjutkan informasi tersebut ke warga yang bersangkutan.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

2) Menurut Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menyampaikan informasi mengenai program BPNT kepada masyarakat?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan:

“Tantangan yang saya hadapi dalam menyampaikan informasi mengenai program BPNT kepada masyarakat adalah adanya penerima yang belum sepenuhnya mengerti tentang kegunaan program tersebut. Beberapa di antaranya masih kurang paham tujuan dan manfaat dari BPNT, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih detail dan waktu tambahan untuk memastikan mereka benar-benar memahami program ini serta cara penggunaannya dengan benar.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

- 3) Menurut Ibu, siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi terkait program BPNT di Kelurahan Jahab?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan:

“Dalam proses komunikasi terkait program BPNT di Kelurahan Jahab, yang terlibat tentu saja adalah Lurah bersama dengan Kasi Sosial. Mereka bekerja sama untuk memastikan informasi mengenai program ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, termasuk memberikan arahan dan penjelasan yang diperlukan kepada para penerima manfaat.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

c. Menurut *informant* : Ibu Mariam Sumarni selaku penerima BPNT

- 1) Menurut Ibu, apakah program BPNT pernah disosialisasikan kepada Masyarakat?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan: "Pernah, tapi hanya dalam bentuk pemberitahuan saja. Kalau yang benar-benar berupa sosialisasi, sepertinya tidak ada." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah untuk mendapatkan bantuan program BPNT harus mendaftar dulu atau tidak?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan:

"Saya pribadi tidak mendaftar sendiri. Waktu itu, yang mengurus pendaftaran adalah RT kami. Jadi, kami hanya menerima informasi kalau nama kami sudah masuk sebagai penerima bantuan. Setahu saya, RT yang menentukan siapa saja warga yang dianggap berhak mendapatkan bantuan itu. Biasanya mereka melihat kondisi warga, seperti siapa yang memang membutuhkan bantuan lebih." (Wawancara, 15 November 2024)

- 3) Menurut Ibu, dari mana Ibu mendapatkan informasi mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan:

"Saya mendapatkan informasi dari RT dan Kelurahan. Biasanya mereka memberikan pemberitahuan secara langsung, baik melalui pertemuan warga atau saat menyampaikan informasi ke rumah-rumah. Jadi, informasinya langsung saya terima dari mereka." (Wawancara, 15 November 2024)

d. Menurut *informant* : Ibu Magdalena Sara selaku penerima BPNT

1) Menurut Ibu, apakah program BPNT pernah disosialisasikan kepada Masyarakat?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Saya kurang tahu, Mbak. Biasanya yang mengurus dan megambil itu anak saya. Anak saya yang lebih paham mengenai hal itu" (Wawancara, 15 November 2024)

2) Menurut Ibu, apakah untuk mendapatkan bantuan program BPNT harus mendaftar dulu atau tidak?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Kalau soal mendaftar, itu Pak RT yang ngurus, Mbak. Saya cuma dimintai KTP saja. Saya tinggal tunggu kabar saja." (Wawancara, 15 November 2024)

3) Menurut Ibu, dari mana Ibu mendapatkan informasi mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Saya tidak begitu tahu, Mbak. Tapi biasanya Pak RT yang datang ke rumah memberikan informasi soal bantuan itu." (Wawancara, 15 November 2024)

e. Menurut *informant* : Ibu Ribka Dambu selaku penerima BPNT

- 1) Menurut Ibu, apakah program BPNT pernah disosialisasikan kepada Masyarakat?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: "Tidak ada, sejauh yang saya tahu. Informasinya hanya saya dapatkan dari RT, itu pun sebatas pemberitahuan singkat, tanpa penjelasan lebih". (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah untuk mendapatkan bantuan program BPNT harus mendaftar dulu atau tidak?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: "Setahu saya, saya hanya diminta memberikan berkas yang diperlukan oleh RT, seperti fotokopi KTP dan KK. Selanjutnya semua diurus oleh RT, jadi saya sendiri tidak tahu apakah itu termasuk proses pendaftaran atau bukan." (Wawancara, 15 November 2024)

- 3) Menurut Ibu, dari mana Ibu mendapatkan informasi mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: "Saya mendapatkan informasi dari Pak RT dan juga dari pihak kelurahan. Biasanya informasi disampaikan melalui pengumuman di tingkat RT atau saat ada pertemuan di kelurahan." (Wawancara, 15 November 2024)

f. Menurut *informant* : Ibu Riri Gunarti selaku penerima BPNT

- 1) Menurut Ibu, apakah program BPNT pernah disosialisasikan kepada Masyarakat?

Menurut Ibu Riri Gunarti mengatakan: “Iya, pernah. Biasanya ada petugas yang datang ke rumah untuk memberikan penjelasan tentang program ini, walaupun tidak terlalu sering.”

(Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah untuk mendapatkan bantuan program BPNT harus mendaftar dulu atau tidak?

Menurut Ibu Riri Gunarti mengatakan: “Kalau saya tahu, ya, harus mendaftar dulu. Biasanya melalui RT atau pihak desa.”

(Wawancara, 15 November 2024)

- 3) Menurut Ibu, dari mana Ibu mendapatkan informasi mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: “Saya dapat informasi dari RT dan perangkat desa. Kadang juga ada informasi dari pengumuman di balai desa.” (Wawancara, 15

November 2024)

g. Menurut *informant* : Ibu Helda Pindan selaku penerima BPNT

- 1) Menurut Ibu, apakah program BPNT pernah disosialisasikan kepada Masyarakat?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: “Ya, pernah. Biasanya lewat pertemuan di balai desa atau melalui kepala RT.”

(Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah untuk mendapatkan bantuan program BPNT harus mendaftar dulu atau tidak?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: “Seingat saya, harus mendaftar dulu, tapi ada juga yang langsung terdata kalau sebelumnya sudah ikut program lain.” (Wawancara, 15 November 2024)

- 3) Menurut Ibu, dari mana Ibu mendapatkan informasi mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: “Saya dapat informasi dari pengurus RT dan teman-teman yang sudah lebih dulu menerima bantuan”. (Wawancara, 15 November 2024)

2. Sumber Daya

- a. Menurut *key informant* : Bapak Lurah Laoren Sirenden, S. Sos.

- 1) Menurut Bapak apakah ada tim khusus untuk melaksanakan program BPNT?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Ya, memang ada tim khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan program BPNT. Tim ini biasanya terdiri dari orang-orang yang sudah memahami detail program, seperti pendamping sosial, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya. Mereka bertugas memastikan program berjalan sesuai aturan, mulai dari proses pendataan penerima hingga pelaksanaan di lapangan. Kehadiran tim khusus ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan transparan, serta untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Bapak apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada petugas atau staf terkait program BPNT?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Sejauh yang saya tahu, ada pelatihan khusus yang diberikan kepada petugas atau staf terkait program BPNT, terutama dari Puskesmas. Dalam pelatihan tersebut, petugas diberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme program, mulai dari proses pendataan hingga penyaluran bantuan. Hal ini sangat membantu para petugas agar lebih siap dan mampu menjelaskan program kepada masyarakat dengan jelas, serta menangani kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Dengan adanya pelatihan ini, pelaksanaan program BPNT menjadi lebih terarah dan efektif." (Wawancara, 15 November 2024)

- b. Menurut *key informant* : Sri Suhariyati, S. Sos. Pendamping BPNT

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan:

- 1) Menurut Ibu, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya untuk program BPNT di wilayah Ibu?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan: "Yang terlibat itu biasanya Dinas Sosial. Di sini khususnya, Kelurahan Jahab atau kadang pihak dari desa juga ikut membantu. Mereka yang mengurus data penerima, distribusi, dan koordinasi dengan pihak lain seperti pendamping atau *e-warong*." (Wawancara, 14 Januari 2025)

- 2) Menurut Ibu, kapan biasanya Ibu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan program BPNT?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan: "Sebenarnya saya tidak melakukan evaluasi terlalu sering, tapi

pasti ada sesekali saya melakukannya. Waktunya juga tidak menentu, tergantung situasi dan kebutuhan. Kalau saya rasa perlu evaluasi, baru saya lakukan.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

- 3) Menurut Ibu, Bagaimana Ibu mengatasi kendala yang muncul terkait sumber daya dalam pelaksanaan program BPNT ini?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan: “Iya, biasanya kami mengatasinya dengan melakukan pertemuan bersama. Pertemuan bersama dengan Dinas Sosial di Kelurahan atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Kami diskusi untuk mencari solusi atas kendala yang ada.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

- 4) Menurut Ibu, apakah ibu sudah bekerja sesuai dengan peraturan?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan: “Ya, menurut saya, saya sudah melakukan yang terbaik dan telah bekerja sesuai dengan aturan yang ada.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

- c. Menurut *informant* : Ibu Mariam Sumarni sebagai penerima BPNT

- 1) Adakah pendamping mendatangi Ibu dalam hal bantuan BPNT, apakah ada?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan: "Tidak ada. Selama ini tidak pernah ada pendamping yang datang menemui saya terkait bantuan BPNT." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah pendamping selalu memberikan pengarahan/bimbingan mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan: "Pengarahannya cuma dilakukan sekali saja, waktu awal program

dimulai. Setelah itu, tidak ada lagi bimbingan atau pengarahan yang diberikan oleh pendamping." (Wawancara, 15 November 2024)

Menurut *informant* : Ibu Magdalena Sara sebagai penerima BPNT

- 1) Adakah pendamping mendatangi Ibu dalam hal bantuan BPNT, apakah ada?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Tidak ada, Mbak. Cuma dari Pak RT." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah pendamping selalu memberikan pengarahan/bimbingan mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Sepertinya tidak ada, Mbak. Biasanya cuma pertama kali saja, waktu awal-awal. Setelah itu tidak ada lagi." (Wawancara, 15 November 2024)

d. Menurut *informant* : Ibu Ribka Dambu sebagai penerima BPNT

- 1) Adakah pendamping mendatangi Ibu dalam hal bantuan BPNT, apakah ada?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: "Tidak ada, tidak pernah ada pendamping yang datang langsung kepada saya terkait bantuan BPNT." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah pendamping selalu memberikan pengarahan/bimbingan mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: "Tidak selalu ada pengarahan, tapi pernah ada pendamping yang datang untuk

memberikan penjelasan. Namun, itu hanya sekali dan tidak rutin."

(Wawancara, 15 November 2024)

e. Menurut *informant* : Ibu Riri Gunarti sebagai penerima BPNT

- 1) Adakah pendamping mendatangi Ibu dalam hal bantuan BPNT, apakah ada?

Menurut Ibu Riri Gunarti mengatakan: "Ada, biasanya pendamping datang kalau ada pembaruan data atau pembagian bantuan." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah pendamping selalu memberikan pengarahan/bimbingan mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Riri Gunarti mengatakan: "Tidak selalu, tetapi kalau ada hal penting, mereka biasanya memberi pengarahan." (Wawancara, 15 November 2024)

f. Menurut *informant* : Ibu Helda Pindan sebagai penerima BPNT

- 1) Adakah pendamping mendatangi Ibu dalam hal bantuan BPNT, apakah ada?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: "Ada, tapi tidak sering. Biasanya hanya kalau ada kendala atau saat pencairan". (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, apakah pendamping selalu memberikan pengarahan/bimbingan mengenai program BPNT?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: "Tidak selalu, tapi kalau saya bertanya, mereka biasanya menjelaskan dengan baik". (Wawancara, 15 November 2024)

3. Disposisi

- a. Menurut *key informant* : Bapak Lurah Laoren Sirenden, S. Sos.
- 1) Menurut Bapak apakah Bapak terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi program BPNT ini?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Ya, saya terlibat langsung dalam proses perencanaan dan implementasi program BPNT. Dalam perencanaan, saya ikut memberikan masukan terkait kebutuhan masyarakat, data penerima yang layak, serta mekanisme yang paling sesuai agar program ini berjalan dengan baik. Sementara dalam implementasi, saya bersama tim memastikan bantuan sampai ke masyarakat tepat sasaran, mengawasi distribusi, dan memberikan pendampingan jika ada warga yang memerlukan bantuan teknis atau informasi tambahan. Dengan keterlibatan ini, saya berharap program BPNT benar-benar bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Bapak motivasi seperti apa yang bisa dilakukan dalam menjalankan program BPNT di Kelurahan Jahab?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Menurut saya, motivasi yang bisa dilakukan dalam menjalankan program BPNT di Kelurahan Jahab adalah dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang tujuan program ini, yaitu membantu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan bergizi untuk keluarga mereka. Saya juga ingin menekankan bahwa bantuan ini tidak seharusnya digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai, seperti membeli pulsa atau kebutuhan lain di luar ketentuan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat, seperti RT, RW, dan tokoh agama, untuk terus mengedukasi penerima manfaat agar menggunakan bantuan ini dengan bijak. Selain itu, petugas juga perlu mengawasi pelaksanaan program ini dengan baik agar tujuan utamanya tercapai." (Wawancara, 15 November 2024)

- 3) Menurut Bapak, apakah pencairan dana program BPNT selalu tepat waktu?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Sejauh ini, pencairan dana program BPNT sering kali tidak tepat waktu. Salah satu alasan utama keterlambatan ini adalah karena proses pencairan sangat bergantung pada kewenangan Dinas Sosial, yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses data atau memberikan persetujuan. Akibatnya, masyarakat penerima bantuan harus menunggu lebih lama dari yang dijadwalkan. Hal ini tentu cukup menyulitkan, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Kami berharap Dinas Sosial dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat proses administrasi agar pencairan dana bisa berjalan lebih tepat waktu."
(Wawancara, 15 November 2024)

- b. Menurut *key informant* : Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. Pendamping BPNT

- 1) Menurut Ibu, apakah Ibu terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi program BPNT ini?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan:

"Iya, saya terlibat dalam prosesnya. Saya ikut berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial dan kelurahan untuk menyusun kebutuhan dan mekanisme program. Sedangkan dalam implementasi, saya memastikan program berjalan sesuai rencana, mulai dari pendistribusian hingga pemantauan pelaksanaannya di lapangan." (Wawancara, 14 Januari 2025)

- 2) Menurut Ibu, apakah evaluasi terhadap efektivitas program BPNT bisa dilakukan kapan saja?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan:

“Sebenarnya, iya, evaluasi bisa dilakukan kapan saja. Biasanya evaluasi dilakukan setelah program berjalan untuk beberapa waktu atau jika muncul kendala tertentu. Tapi jika diperlukan, evaluasi juga bisa dilakukan sewaktu-waktu, terutama untuk memastikan program tetap berjalan dengan baik.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

- 3) Menurut Ibu, apakah pencairan dana program BPNT selalu tepat waktu?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan:

“Tidak selalu tepat waktu, ada beberapa kali pencairan yang terlambat. Biasanya kendalanya terkait dengan masalah administrasi, seperti verifikasi data penerima yang belum selesai atau adanya perubahan data yang harus diperbaiki. Selain itu, terkadang juga ada kendala teknis, misalnya sistem pencairan yang bermasalah atau proses koordinasi antara pihak-pihak terkait yang memakan waktu lebih lama.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

- c. Menurut *informant* : Ibu Mariam Sumarni sebagai penerima BPNT

- 1) Apakah selama ini Ibu sudah menerima bantuan tepat waktu?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan: "Tidak tepat waktu. Kadang bantuannya datang lebih cepat, tapi sering juga datang lebih lambat dari jadwal yang seharusnya." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Ibu, bantuan program BPNT biasanya dilakukan dimana?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan: "Biasanya dilakukan di *E-warong*. Di sana kami mengambil bantuan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan" (Wawancara, 15 November 2024)

d. Menurut *informant* : Ibu Magdalena Sara sebagai penerima BPNT

1) Apakah selama ini Ibu sudah menerima bantuan tepat waktu?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Tidak menentu, Mbak. Kadang-kadang terlambat. Jadi nggak selalu sesuai jadwal." (Wawancara, 15 November 2024)

2) Menurut Ibu, bantuan program BPNT biasanya dilakukan dimana?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Pertama, Mbak, dapat informasi dari kantor pos dulu. Baru kami melakukan transaksi di *E-Warong*." (Wawancara, 15 November 2024)

e. Menurut *informant* : Ibu Ribka Dambu sebagai penerima BPNT

1) Apakah selama ini Ibu sudah menerima bantuan tepat waktu?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: "Tidak tepat waktu, Mbak, karena jadwalnya tidak menentu. Kadang datang terlambat, jadi kami tidak bisa memprediksi kapan bantuan itu benar-benar diterima." (Wawancara, 15 November 2024)

2) Menurut Ibu, bantuan program BPNT biasanya dilakukan dimana?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: mengatakan "Biasanya saya dapat informasi dari kelurahan bahwa pencairannya dilakukan di kantor pos. Jadi, kalau sudah ada pemberitahuan, kami pergi ke sana untuk mengambilnya." (Wawancara, 15 November 2024)

f. Menurut *informant* : Ibu Riri Gunarti sebagai penerima BPNT

1) Apakah selama ini Ibu sudah menerima bantuan tepat waktu?

Menurut Ibu Riri Gunarti mengatakan: “Kadang tepat waktu, tetapi ada juga beberapa kali terlambat, terutama kalau ada masalah di data” (Wawancara, 15 November 2024)

2) Menurut Ibu, bantuan program BPNT biasanya dilakukan dimana?

Menurut Ibu Riri Gunarti mengatakan: “Biasanya di *E-Warong* atau tempat yang sudah ditunjuk oleh desa.” (Wawancara, 15 November 2024)

g. Menurut *informant* : Ibu Helda Pindan sebagai penerima BPNT

1) Apakah selama ini Ibu sudah menerima bantuan tepat waktu?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: “Kadang-kadang terlambat, terutama saat data belum diperbarui.” (Wawancara, 15 November 2024)

2) Menurut Ibu, bantuan program BPNT biasanya dilakukan dimana?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: “Di *e-warong* atau lokasi yang sudah ditentukan, tergantung daerahnya” (Wawancara, 15 November 2024)

4. Struktur Birokrasi

a. Menurut *key informant* : Bapak Lurah Laoren Sirenden, S. Sos.

1) Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam program BPNT?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Menurut saya, orang-orang yang terlibat dalam program BPNT terutama adalah pihak dari Kasi Sosial. Mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan data penerima, koordinasi dengan pendamping sosial, serta memastikan bantuan disalurkan dengan tepat sasaran. Selain itu, mereka juga berperan dalam memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan tujuan program ini. Kehadiran Kasi Sosial sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Menurut Bapak, struktur birokrasi yang ada di Kelurahan Jahab apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan?

Menurut Bapak Laoren Sirenden, S. Sos. mengatakan:

"Menurut saya, struktur birokrasi yang ada di Kelurahan Jahab sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap tugas dan tanggung jawab sudah dibagi dengan jelas di antara perangkat kelurahan, mulai dari lurah, Kasi, hingga staf lainnya. Proses pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan secara transparan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Dengan adanya koordinasi yang baik di antara semua pihak, pelaksanaan program dan layanan di Kelurahan Jahab dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan." (Wawancara, 15 November 2024)

- b. Menurut *key informant* : Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. Pendamping BPNT

- 1) Menurut Ibu, kapan program BPNT mulai diimplementasikan di Kelurahan Jahab?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan: "Program BPNT mulai diimplementasikan di Kelurahan Jahab sekitar tahun 2018" (Wawancara, 14 Januari 2025)

- 2) Menurut Ibu, apakah struktur birokrasi yang ada sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku?

Menurut Ibu Sri Suhariyati, S. Sos. mengatakan:

“Iya, menurut saya struktur birokrasi yang ada sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena setiap proses dalam program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, selalu mengikuti pedoman dan prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu, kami juga sering melakukan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan.” (Wawancara, 14 Januari 2025)

c. Menurut *informant* : Ibu Mariam Sumarni sebagai penerima BPNT

1) Menurut Ibu apakah ada pemberitahuan bahwa harus mendaftar BPNT?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan: "Setahu saya, tidak ada pemberitahuan khusus untuk mendaftar sendiri. Yang mendaftarkan saya itu RT. Kami hanya diminta menyerahkan berkas, seperti KTP dan dokumen lain yang dibutuhkan." (Wawancara, 15 November 2024)

2) Apakah selama ini program BPNT itu mudah atau sulit dalam hal pendaftaran?

Menurut Ibu Mariam Sumarni mengatakan: "Tentu tidak sulit, karena kami dibantu oleh RT dan orang-orang yang memang mengetahui tentang program itu. Jadi, kami tinggal mengikuti arahan saja, menyerahkan dokumen seperti KTP, dan selebihnya mereka yang mengurus." (Wawancara, 15 November 2024)

d. Menurut *informant* : Ibu Magdalena Sara sebagai penerima BPNT

1) Menurut Ibu apakah ada pemberitahuan bahwa harus mendaftar BPNT?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Saya tidak tahu, mbak, karena yang mengurus pendaftarannya itu Pak RT."

(Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Apakah selama ini program BPNT itu mudah atau sulit dalam hal pendaftaran?

Menurut Ibu Magdalena Sara mengatakan: "Tidak sulit, Mbak. Ya, karena Pak RT yang urus semuanya. Saya tinggal kasih dokumen yang diminta, seperti KTP". (Wawancara, 15 November

2024)

- e. Menurut *informant* : Ibu Ribka Dambu sebagai penerima BPNT

- 1) Menurut Ibu apakah ada pemberitahuan bahwa harus mendaftar BPNT?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: "Ada, Mbak, tapi biasanya yang mengurus itu pihak RT. Kami hanya diminta untuk menyerahkan berkas seperti KTP dan KK." (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Apakah selama ini program BPNT itu mudah atau sulit dalam hal pendaftaran?

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan:

Menurut Ibu Ribka Dambu mengatakan: "Ada, Mbak, tapi biasanya yang mengurus itu pihak RT. Kami hanya diminta untuk menyerahkan berkas seperti KTP dan KK." (Wawancara, 15 November 2024)

- f. Menurut *informant* : Ibu Riri Gunarti sebagai penerima BPNT

- 1) Menurut Ibu apakah ada pemberitahuan bahwa harus mendaftar BPNT?

Menurut Ibu Riri Gunarti mengatakan: “Iya, ada pemberitahuan dari RT atau perangkat desa untuk mendaftar.”
(Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Apakah selama ini program BPNT itu mudah atau sulit dalam hal pendaftaran?

Menurut Ibu Riri Gunarti mengatakan: “Menurut saya, cukup mudah, asalkan ada dokumen lengkap”. (Wawancara, 15 November 2024)

- g. Menurut *informant* : Ibu Helda Pindan sebagai penerima BPNT

- 1) Menurut Ibu apakah ada pemberitahuan bahwa harus mendaftar BPNT?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: “Ya, ada. Biasanya lewat RT atau pengumuman di desa” (Wawancara, 15 November 2024)

- 2) Apakah selama ini program BPNT itu mudah atau sulit dalam hal pendaftaran?

Menurut Ibu Helda Pindan mengatakan: “Menurut saya, agak sulit kalau tidak tahu syarat-syaratnya” (Wawancara, 15 November 2024)

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian menyatakan bahwa ada beberapa elemen penting yang memengaruhi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Elemen-elemen ini memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program, namun juga dapat menjadi sumber kendala jika tidak dikelola dengan baik.

1. Komunikasi

George C. Edward III mengatakan bahwa Setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus disampaikan atau diberitahukan kepada bagian personalia yang tepat agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan public.

Hasil wawancara mengidentifikasikan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program BPNT adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Masalah ini memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerimaan program oleh para penerima manfaat (Keluarga Penerima Manfaat/KPM). Banyak Masyarakat mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai mekanisme, manfaat, dan tata cara pengambilan BPNT. Hal ini sering disebabkan oleh keterbatasan akses komunikasi. Sosialisasi terkait program BPNT sering kali dilakukan hanya sekali saja, biasanya melalui pertemuan formal seperti rapat desa. Pola ini menyebabkan informasi yang disampaikan kurang efektif, terutama bagi masyarakat

yang tidak sempat hadir atau tidak memiliki akses ke pertemuan tersebut. Selain itu, tidak adanya upaya tindak lanjut atau pengulangan informasi membuat banyak penerima manfaat merasa kebingungan dengan mekanisme program.

Kurangnya sosialisasi merupakan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan BPNT. Hal ini perlu segera diatasi agar program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima manfaat. Dengan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan interaktif, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap program sosial yang mereka jalankan.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan publik, George C. Edward III menekankan pentingnya sumber daya sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Terdapat tiga elemen kunci dalam faktor sumber daya, yaitu staf, informasi, dan wewenang. Ketiga elemen ini saling terkait dan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Petugas atau staf yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan kebijakan dengan efektif. Pelatihan yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan mereka memahami tujuan, prosedur, dan mekanisme kebijakan. Informasi yang jelas mengenai tujuan kebijakan harus disampaikan kepada semua pihak

yang terlibat, termasuk staf pelaksana dan masyarakat penerima manfaat. Ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Wewenang harus dibagi dengan jelas antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan konflik antarinstansi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak sumber daya manusia yang bekerja untuk menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tidak memahami mekanisme program sepenuhnya. Akibatnya, ada kesalahan dalam menyampaikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang syarat dan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan, lokasi penyaluran yang ditetapkan, dan bagaimana menggunakan kartu BPNT untuk membeli barang yang diperlukan. Akibatnya, banyak masyarakat yang menjadi bingung atau tidak memanfaatkan bantuan secara optimal. Selain itu, koordinasi antara petugas di lapangan dengan pihak pengelola program juga cenderung kurang efektif, karena kurangnya panduan teknis yang jelas dan komunikasi yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman pada level sumber daya manusia menjadi salah satu kendala signifikan dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program BPNT di lapangan.

3. Disposisi

George C. Edward III menyatakan bahwa disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah komponen penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam faktor disposisi, terdapat dua hal utama yang perlu dicermati, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Pertama, pengangkatan birokrat berkaitan dengan bagaimana pemilihan individu untuk mengisi posisi pelaksana kebijakan dilakukan. Birokrat yang diangkat harus memiliki kompetensi, pemahaman, dan sikap yang sejalan dengan tujuan kebijakan. Jika individu yang diangkat tidak memiliki komitmen terhadap kebijakan atau bahkan tidak memahami kebijakan tersebut, pelaksanaannya dapat terhambat. Oleh karena itu, proses pengangkatan harus dilakukan secara transparan dan berbasis kualifikasi, agar kebijakan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan dedikasi tinggi. Kedua, insentif merupakan aspek yang memengaruhi motivasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Insentif dapat berupa penghargaan finansial, seperti bonus atau tunjangan, maupun non-finansial, seperti pengakuan atas kinerja yang baik atau peluang pengembangan karier. Dengan adanya insentif yang tepat, pelaksana kebijakan akan lebih termotivasi untuk bekerja secara maksimal dan mencapai tujuan kebijakan. Sebaliknya, kurangnya insentif atau ketidakadilan dalam distribusi penghargaan dapat menurunkan semangat kerja dan menimbulkan resistensi terhadap kebijakan. Secara keseluruhan, pengangkatan birokrat yang tepat dan

pemberian insentif yang sesuai memainkan peran penting dalam membentuk disposisi positif di kalangan pelaksana kebijakan. Hal ini memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga memiliki komitmen dan motivasi untuk mengimplementasikannya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa lurah Kelurahan Jahab telah terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di wilayahnya. lurah berperan penting dalam mengoordinasikan proses distribusi informasi, memastikan masyarakat memahami mekanisme program, serta memantau pelaksanaan di lapangan. Meskipun lurah menunjukkan komitmen yang tinggi, pencairan dana BPNT sering mengalami keterlambatan. Masalah ini disebabkan oleh proses penyesuaian data penerima manfaat yang dilakukan oleh Dinas Sosial, yang sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Proses validasi dan pembaruan data diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, tetapi kurangnya koordinasi yang efisien antara Dinas Sosial dan pihak-pihak terkait di tingkat lokal menjadi hambatan utama. Akibatnya, keterlambatan pencairan dana tidak hanya mengganggu kelancaran program, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

4. Struktur Birokrasi

George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153) menyatakan bahwa struktur birokrasi bertanggung jawab atas tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.

Ia menegaskan bahwa dalam faktor struktur birokrasi, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP berperan sebagai panduan kerja yang jelas dan terperinci bagi setiap pelaksana kebijakan. Dengan adanya SOP, setiap tahapan dalam implementasi kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun, jika SOP tidak dirumuskan dengan baik, terlalu kompleks, atau tidak relevan dengan kondisi lapangan, hal ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, fragmentasi mengacu pada pembagian tanggung jawab dan koordinasi antarinstansi atau unit kerja dalam struktur birokrasi. Fragmentasi yang buruk, seperti adanya tumpang tindih wewenang atau kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menyebabkan inefisiensi dan konflik dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang ideal harus memastikan SOP yang jelas dan relevan, serta koordinasi yang efektif di antara semua pihak terkait. Dengan memperhatikan kedua aspek ini, kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih terorganisasi dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tugas perangkat kelurahan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai

(BPNT) sudah cukup jelas. Mereka bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pendataan penerima manfaat, mendistribusikan informasi kepada masyarakat, serta memastikan program berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun tugas tersebut telah terdefiniskan dengan baik, sosialisasi program masih belum terstruktur dengan baik. Proses penyampaian informasi sering dilakukan secara ad hoc, tanpa jadwal atau pola komunikasi yang terencana. Selain itu, metode sosialisasi yang digunakan cenderung bersifat satu arah dan kurang memanfaatkan media atau platform yang lebih luas seperti media sosial, radio lokal, atau forum masyarakat. Akibatnya, banyak warga yang belum sepenuhnya memahami mekanisme program, termasuk persyaratan, prosedur pencairan, dan manfaat yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat kelurahan telah memahami tanggung jawab mereka, diperlukan upaya untuk menyusun strategi sosialisasi yang lebih terorganisasi dan efektif agar tujuan program dapat tercapai dengan lebih baik.

4.8 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

4.8.1 Faktor Pendukung

Keberhasilan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memastikan efektivitas pelaksanaannya. Salah satu faktor utama adalah keberadaan *E-Warong* yang terletak di lokasi strategis, dekat, dan mudah dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lokasi yang

mudah diakses ini memudahkan KPM dalam mendapatkan bantuan pangan tanpa harus menempuh perjalanan jauh atau menghadapi kendala transportasi. Selain itu, keberadaan *E-Warong* yang tersebar secara merata di berbagai wilayah juga membantu mengurangi antrean panjang dan memastikan distribusi bantuan berlangsung lebih cepat serta efisien. Dengan demikian, aksesibilitas yang baik menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberlanjutan dan kesuksesan program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

4.8.2 Faktor Penghambat

Meskipun Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang dapat mengurangi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya informasi yang menyeluruh kepada masyarakat, sehingga banyak orang tidak memahami bahwa BPNT hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kurangnya sosialisasi ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga kerap menghadapi ketidakpastian terkait jadwal pencairan bantuan. Ketidakjelasan ini dapat menyulitkan perencanaan keuangan keluarga

penerima, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan penyebaran informasi yang lebih baik sangat diperlukan agar program BPNT dapat berjalan dengan lebih optimal dan tepat sasaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka berikut hasil kesimpulan yang di dapatkan oleh peneliti dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengemukakan kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Komunikasi, dalam penyampaian informasi BPNT menggabungkan tatap muka dan media yang mudah diakses. Sosialisasi melalui musyawarah desa, pertemuan warga, dan kunjungan rumah memastikan pemahaman yang jelas dan membangun kepercayaan. Sementara itu, teknologi seperti WhatsApp, SMS, dan pengumuman publik mempercepat penyebaran informasi. Peran perangkat desa, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan akses teknologi, dapat menerima informasi dengan baik, sehingga bantuan tersalurkan lebih tepat sasaran.
2. Sumber daya, pelaksanaan BPNT didukung oleh tim khusus yang terdiri dari pendamping sosial, perangkat desa, dan pihak terkait, yang bertanggung jawab atas pendataan hingga penyaluran bantuan. Untuk meningkatkan efektivitas, petugas mendapat pelatihan dari Puskesmas guna memahami mekanisme program, menyampaikan informasi, serta

menangani kendala. Dengan tim terlatih, distribusi bantuan menjadi lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien.

3. Disposisi, pelaksanaan BPNT memerlukan perencanaan matang dan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Masukan masyarakat dan mekanisme distribusi yang efektif mendukung kelancaran program. Selama implementasi, pengawasan dan edukasi oleh tokoh masyarakat membantu penerima memanfaatkan bantuan dengan bijak. Namun, keterlambatan pencairan dana akibat proses administrasi di Dinas Sosial masih menjadi tantangan. Untuk mengatasinya, diperlukan koordinasi lebih baik dan percepatan administrasi agar manfaat BPNT dapat dirasakan maksimal.
4. Pelaksanaan BPNT di Kelurahan Jahab dipimpin oleh Kasi Sosial, yang mengelola data penerima, berkoordinasi dengan pendamping sosial, dan memastikan distribusi tepat sasaran. Mereka juga bertanggung jawab atas sosialisasi program. Struktur birokrasi yang tertata dengan pembagian tugas jelas memungkinkan pelayanan berjalan transparan dan sesuai prosedur. Koordinasi yang baik antar pihak memastikan program terlaksana dengan lancar dan efektif.

5.2 Saran

1. Komunnikasi, untuk meningkatkan efektivitas BPNT, sosialisasi perlu diperluas melalui media seperti WhatsApp, media sosial, dan papan pengumuman di tempat strategis. Keterlibatan tokoh masyarakat, seperti ketua RT, RW, dan tokoh agama, juga penting agar informasi lebih personal dan dipercaya. Dengan pendekatan ini, pemahaman masyarakat meningkat, sehingga bantuan dimanfaatkan optimal dan tepat sasaran.
2. Sumber daya, untuk meningkatkan efektivitas program sosial, diperlukan penambahan pendamping sosial agar setiap penerima manfaat mendapat pendampingan lebih intensif. Selain itu, pelatihan berkala bagi pendamping sangat penting untuk memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan memahami kebijakan terbaru. Dengan pendamping yang terlatih, program sosial dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
3. Disposisi, agar BPNT lebih optimal, sistem pencairan dana perlu diperbaiki dengan meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial, bank penyalur, dan pihak terkait untuk mempercepat administrasi. Penggunaan teknologi real-time juga dapat membantu memantau pencairan dan mengatasi hambatan. Dengan perbaikan ini, keterlambatan dapat diminimalisir, memastikan penerima manfaat tepat waktu memenuhi kebutuhan pokok mereka.

4. Agar BPNT lebih efektif, alur pendaftaran dan distribusi bantuan perlu dibuat jelas dan mudah dipahami. Panduan tertulis atau digital dapat membantu menjelaskan syarat dan prosedur. Sosialisasi rutin melalui pertemuan warga, media sosial, dan WhatsApp memastikan informasi tersampaikan. Pelibatan perangkat desa, pendamping sosial, dan tokoh masyarakat juga penting untuk membantu warga yang mengalami kendala, sehingga bantuan tersalurkan lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ADE ISMAYANI, 2019, *Metodelogi Penelitian*, Penerbit Syiah Kuala University Press, Aceh.
- AGUSTINO, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- AHMAD MUSTANIR, 2022, *Pelayanan Publik*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- AJAT RUKAJAT, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- ALBI ANGGITO & JOHAN SETIAWAN, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV Jejak, Sukabumi.
- ANDI PRASTOWO, 2016, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- ARIFIN TAHIR, 2014, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit Cv Alfabeta, Bandung.
- BUDI WINARNO, 2014, *Kebijakan Publik : Teori & Proses*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta.
- BURHAN BUNGIN, 2014, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Kencana Prenada Media, Jakarta.
- DANANG SUNYOTO, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit PT Buku Seru, Jakarta.
- DEDDY MULYADI, 2015, *Implementasi Organisasi*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- FARIDA YUSUF TAYIBNAFIS, 2013, *Evaluasi Program*, Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta.
- HAMDI MUCHLIS, 2014, *Kebijakan Publik Proses Analisis dan Partisipasi*, Perbit Ghalia, Bogor.
- HANDOKO, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- HARBANI PASOLONG, 2020, *Metode Penelitian Administrasi Cetakan Ke-4*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- HASNIATI DKK, 2020, *Public Trust Dalam Pelayanan Organisasi Publik Konsep, Dimensi & Strategi*, Penerbit UPT Unhas Press, Makassar.
- HUSAINI USMAN & PURNOMO SETIADY AKBAR, 2017, *Metodelogi Penelitian Sosial Edisi Ketiga*, Penerbit PT Bumi AKSARA, Jakarta.
- IRHAN FAHMI, 2017, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep dan Kinerja)*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- KADEK AYU ASTITI, *Evaluasi Pembelajaran*, Penerbit CV. Andi Offset Miranti Oktaviani, Yogyakarta.
- LEO AGUSTINO, 2016, *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- _____, 2017, , *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- LEXY J. MOLEONG, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- _____, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- M. ALI SODIK, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Penerbit Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- MUHAMMAD SAWIR, 2020, *Birokrasi Pelayanan Publik*, Penerbit Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- MUSLICH ANSHORI & SRI ISNAWATI, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- SUGIYONO, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- _____, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- _____, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- _____, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- SUMADI SURYABRATA, 2014, *Metodeologi Penelitian*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SUWARMA AL MUCHTAR, 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Penerbit Gelar Potensi Mandiri, Bandung.
- ULBER SILALAH, 2017, *Metodelodi Penelitian Sosial*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- V. WIRATNA SUJARWENI, 2014, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- WARUL WALIDIN, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Penerbit FTK Ar-Rainry, Aceh.

Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Jurnal :

Ali Hasymi, M., Faisol, A., & Ariwibisono, F. (2021). Sistem Informasi Geografis

Pemetaan Warga Kurang Mampu Di Kelurahan Karang Besuki

Menggunakan Metode K-Means Clustering. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik*

Informatika), 5(1), 284–290. <https://doi.org/10.36040/jati.v5i1.3269>

Erlia Harahap, A. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Dana

Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Portibi Jae Dengan Penerapan

Kombinasi Metode PROMETHEE Dengan AHP. *JURNAL MEDIA*

INFORMATIKA, 5(1), 62–75. <https://doi.org/10.55338/justikpen.v3i2.90>

Syafitri, I., & Ramadhani, P. (2024). *Konstruksi Konsep Pemberdayaan*

Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal

JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]. 6(1), 201–207.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Foto 1. Kelurahan Jahab Tenggarong



Foto 2. Dinas Sosial Tenggarong



Foto 3. *E-Warong*



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Lurah Jahab (Bapak Laoren Sirenden, S. Sos) selaku *Key Informant*



Foto 5. Wawancara dengan Pendamping BPNT (Ibu Sri Suhariyati, S. Sos) selaku *Key Informant*



Foto 6. Wawancara dengan Penerima BPNT (Mariam Sumarni) selaku *Informant*



Foto 7. Wawancara dengan Penerima BPNT (Magdalena Sara) selaku *Informant*



Foto 8. Wawancara dengan Penerima BPNT (Riri Gunarti) selaku *Informant*



Foto 9. Wawancara dengan Penerima BPNT (Ribka Dambu) selaku *Informant*



Lampiran 2. Surat Persetujuan Judul Skripsi



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 23 November 2023

Nomor : 666/UWGM-FISIP/AK/XI/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Bapak Drs. H. M.Z Arifin, M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Maydi Reichies Manurun
NPM : 2063201080
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Drs. H. M.Z Arifin, M.Si (Sebagai Pembimbing I)
2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yanti, S.Sos., M.Si
NIK.2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 23 November 2023

Nomor : 666/UWGM-FISIP/AK/XI/2023
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth. :
Ibu Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Maydi Reichies Manurun
NPM : 2063201080
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Drs. H. M.Z Arifin, M.Si (Sebagai Pembimbing I)
2. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yahr, S.Sos., M.Si
NIK 2020.087.279

Telp : (0541) 4121117
Fax : (0541) 736572
Email : uwlgama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119

Lampiran 3 Surat Penerimaan Ijin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG
KELURAHAN JAHAB
Alamat Jalan Gunung Triyu RT. 18 Kode Pos 75511

Jahab, 16 Oktober 2024

Nomor : 421.7/ 167 /Sos/Kel – Jhb/11/2024
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Ijin Penelitian

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Politik Universitas Widia Gama
Mahakam Samarinda

di –
Samarinda

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widia Gama Mahakam Samarinda tertanggal 14 Oktober 2024 perihal Permohonan Ijin Penelitian :

Nama : Maydi Reichies Manurun

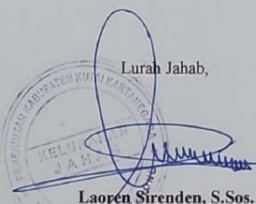
N P M : 2063201080

Program Studi : Administrasi Publik

Berdasarkan perihal diatas pada prinsipnya kami dari pihak Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut, serta menerima yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian di Kelurahan Jahab.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kearah ini di ucapkan terima kasih.

Lurah Jahab,



Laopen Sirenden, S.Sos.
Pehata Tingkat I
NIP. 198604092011011004

Kelurahan Jahab BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Nama : Bapak Laoren Sirenden, S.Sos

Jabatan : Lurah

1. Komunikasi :

- a) Menurut Bapak, apakah masyarakat penerima bantuan sudah mengetahui kegunaan dari bantuan tersebut ?
- b) Menurut Bapak, bagaimana cara agar masyarakat menerima bantuan dapat mengetahui informasi mengenai informasi BPNT?
- c) Menurut Bapak, metode/cara apa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penerima bantuan agar tersampaikan dengan baik?
- d) Menurut Bapak, apakah untuk memberikan informasi itu harus mendaftar masyarakat, usahanya bagaimana pak apakah mendaftar atau Bapak Lurah dan tim nya turun ke masyarakat?

2. Sumber Daya :

- a) Menurut Bapak, apakah ada tim khusus untuk melaksanakan program BPNT?
- b) Menurut Bapak, apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada petugas atau staf terkait program BPNT?

3. Disposisi :

- a) Menurut Bapak, apakah Bapak terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi program BPNT ini ?
- b) Menurut Bapak, motivasi seperti apa yang bisa dilakukan dalam menjalankan program BPNT di Kelurahan Jahab ?
- c) Menurut Bapak, apakah pencairan dana program BPNT selalu tepat waktu?

4. Struktur Birokrasi :

- a) Menurut Bapak, siapa saja yang terlibat dalam program BPNT?
- b) Menurut Bapak, struktur birokrasi yang ada di Kelurahan Jahab apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan?

Nama : Ibu Sri Suhariyati, S.Sos
Jabatan : Pendamping BPNT

1. Komunikasi

- a) Menurut Ibu, bagaimana cara menyampaikan informasi kepada penerima program BPNT, apakah ada metode/cara khusus yang Ibu gunakan?
- b) Menurut Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menyampaikan informasi mengenai program BPNT kepada masyarakat?
- c) Menurut Ibu, siapa saja yang terlibat dalam proses komunikasi terkait program BPNT di Kelurahan Jahab?

2. Sumber Daya :

- a) Menurut Ibu, siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya untuk program BPNT di wilayah Ibu?
- b) Menurut Ibu, kapan biasanya Ibu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan program BPNT?
- c) Menurut Ibu, bagaimana Ibu mengatasi kendala yang muncul terkait sumber daya dalam pelaksanaan program BPNT?
- d) Menurut Ibu, apakah Ibu sudah bekerja sesuai dengan peraturan?

3. Disposisi :

- a) Menurut Ibu, apakah Ibu terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi program BPNT ini?
- b) Menurut Ibu, apakah evaluasi terhadap efektivitas program BPNT bisa dilakukan kapan saja?
- c) Menurut Ibu, apakah pencairan dana program BPNT selalu tepat waktu?

4. Struktur Birokrasi :

- a) Menurut Ibu, kapan program BPNT mulai diimplementasikan di Kelurahan Jahab?
- b) Menurut Ibu, apakah struktur birokrasi yang ada sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku?

Nama : Masyarakat

Jabatan : Penerima BPNT

1. Komunikasi :

- a) Menurut Bapak/Ibu, apakah program BPNT pernah disosialisasikan kepada Masyarakat?
- b) Menurut Bapak/Ibu, apakah untuk mendapatkan bantuan program BPNT harus mendaftar dulu atau tidak?
- c) Menurut Bapak/Ibu, dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai program BPNT?

2. Sumber Daya :

- a) Adakah pendamping mendatangi Bapak/Ibu dalam hal bantuan BPNT, apakah ada?
- b) Menurut Bapak/Ibu, apakah pendamping selalu memberikan pengarahan/bimbingan mengenai program BPNT?

3. Disposisi ;

- a) Apakah selama ini Bapak/Ibu sudah menerima bantuan tepat waktu?
- b) Menurut Bapak/Ibu, bantuan program BPNT biasanya dilakukan dimana?

4. Struktur Birokrasi :

- a) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada pemberitahuan bahwa harus mendaftar BPNT?
- b) Apakah selama ini program BPNT itu mudah atau sulit dalam hal pendaftaran?